

# LAPORAN KINERJA TAHUN 2023



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  
PEMADAM KEBAKARAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2023

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Karena berkat limpahan rahmat dan karunia Nya jua lah, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023.

Laporan ini disusun sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kelanjutan dan juga evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi yang dijabarkan dan tertuang dalam rencana strategis (Renstra) serta Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan. Sampai dengan akhir Desember 2023 anggaran tersebut terserap sebesar Rp 32.827.298.270 Atau sebesar 96,51% dari total anggaran Rp. 34.012.365.655 tahun 2023. Sedangkan Realisasi Fisik Tahun Anggaran 2023 sebesar 100%.

Kami berharap, laporan ini dapat memberikan informasi yang diperlukan sekaligus juga sebagai bahan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program yang menjadi tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada tahun-tahun berikutnya.

Demikian disampaikan, untuk bahan selanjutnya dan atas kerjasama semua pihak diucapkan terima kasih.

Banjarbaru, 10 Januari 2024

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN**



**Drs. ZAKLY ASSWAN, MM**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19650909 1986 02 1 005**

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

#### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum Pembentukan dan Tugas Pokok
- C. Struktur Organisasi
- D. Isu Strategis SKPD
- E. Sistematika Penyajian

#### BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

#### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

##### A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

- 1. Sasaran RPJMD
- 2. Eselon II
- 3. Esselon III
  - 1). Sekretaris
  - 2). Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas
  - 3). Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah
  - 4). Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
  - 5). Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran
- 4. Essolen IV
  - 1.1). Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
  - 1.2). Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 1.3). Kepala Sub Perencanaan dan Pelaporan
  - 2.1). Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Personil
  - 2.2). Kepala Seksi Bina Kesamaptaan
  - 3.1). Kepala Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan
  - 3.2). Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidik
  - 4.1). Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian
  - 4.2). Kepala Seksi Kerjasama
  - 5.1). Kepala Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat
  - 5.2). Kepala Seksi Pemadam Kebakaran

##### B. Akuntabilitas Keuangan

- 1. Anggaran dan Realisasi APBD 2023**
- 2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program**
- 3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan 2023**

## **BAB IV**

## **PENUTUP**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Laporan Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Penyusunan laporan dimaksud diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi berkewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 disusun sebagai upaya memberikan informasi atas efisiensi dan efektivitas pencapaian kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada tahun-tahun berikutnya.

Penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang telah dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang tersusun dalam DPA-SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023 untuk mencapai target/sasaran strategis. Tujuan yang ingin dicapai disusunnya Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 antara lain adalah :

- a. Memenuhi kewajiban atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi berkewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

- b. Bahan evaluasi pencapaian visi, misi, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan, sasaran dan strategi yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan.

## **B. Dasar Hukum Pembentukan dan Tugas Pokok**

1. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Pergub 027 Tahun 2023.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran.

1. Uraian Tugas tersebut adalah :

- a. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi perumusan kebijakan teknis bidang ketenteraman, ketertiban, perlindungan masyarakat, dan pemadaman kebakaran;
- b. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan kapasitas personel;
- c. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan penegakan produk hukum daerah;
- d. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- e. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat dan pemadaman kebakaran;
- f. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pembinaan, pengawasan, dan pengendalian unit pelaksana teknis;
- g. membina, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

2. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang ketenteraman, ketertiban, perlindungan masyarakat, dan pemadaman kebakaran;
- b. pelaksanaan kebijakan pengembangan kapasitas personel;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan produk hukum daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- e. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat dan pemadaman kebakaran;
- f. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- g. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan

- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Berdasarkan Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, keadaan sumber daya pendukung berjumlah 58 (lima puluh delapan) orang yang terdiri 51 orang PNS dan 7 orang PPPK dengan komposisi sebagai berikut :

**Tabel 1.1.**  
**Data Pejabat Struktural / Fungsional**  
**Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**  
**Provinsi Kalimantan Selatan**  
**Keadaan per 31 Desember 2023**

NO.	JABATAN	Eselon	Gol.	Pend. Formal	Jenis Kelamin
1	Kepala Satpol PP & Damkar	II.a	IV/d	S2	L
2	Sekretaris	III.a	IV/b	S1/D4	L
3	Kepala Bidang Penegakkan Produk Hukum Daerah	III.a	III/d	S2	L
4	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran	III.a	IV/b	S1/D4	L
5	Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas	III.a	IV/b	S2	L
6	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	III.a	IV/b	S1/D4	L
7	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	IV.a	III/d	S1	P
8	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	IV.a	III/d	S1	L
9	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	IV.a	III/d	S2	L
10	Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan	IV.a	IV/a	S2	L
11	Kepala Seksi Penyelidikan & Penyidikan	IV.a	III/c	S1	L
12	Kepala Seksi Bina Satuan Linmas	IV.a	III/b	S1/D4	-
13	Kepala Seksi Pemadam Kebakaran	IV.a	III/d	S1	L
14	Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Personil	IV.a	III/b	S1	L
15	Kepala Seksi Bina Kesamaptaan	IV.a	III/d	S1	L
15	Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian	IV.a	III/c	S1	L
16	Kepala Seksi Kerjasama	IV.a	III/c	S1	P

**Data Golongan, Pendidikan dan Jenis Kelamin PNS & PPPK  
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran  
Provinsi Kalimantan Selatan  
Keadaan per 31 Desember 2023**

1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan Per 31 Desember 2023 berjumlah 58 orang dengan jumlah laki-laki 53 orang dan jumlah perempuan 5 orang.

1. Kualifikasi Pendidikan :

- a. Pendidikan S2 : 5 Orang  
berjumlah
- b. Pendidikan S1/D4 : 22 Orang  
berjumlah
- c. Pendidikan D3 : 2 Orang  
berjumlah
- d. Pendidikan SLTA : 28 Orang  
berjumlah
- e. Pendidikan SLTP : 1 Orang  
berjumlah

**Tabel 1.2.**  
**Kualifikasi Pendidikan**

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	S2	5	0	5
2	S1/D4	17	5	22
3	D3	2	0	2
4	SLTA	28	0	28
5	SLTP	1	0	1
6	SD	0	0	0
	Jumlah	53	5	58

2. Pangkat/golongan/ruang :

- a. Pangkat/Golongan Juru Tk I (I/d) berjumlah 1 orang
- b. Pangkat/Golongan Pengatur Muda (II/a) berjumlah 7 orang
- c. Pangkat/Golongan Pengatur (II/c) berjumlah 1 orang
- d. Pangkat/Golongan Pengatur Tk I (II/d) berjumlah 9 orang
- e. Pangkat/Golongan Penata Muda (III/a) berjumlah 7 orang
- f. Pangkat/Golongan Penata Muda Tk I (III/b) berjumlah 15 orang
- g. Pangkat/Golongan Penata (III/c) berjumlah 3 orang
- h. Pangkat/Golongan Penata Tk I (III/d) berjumlah 9 orang



- i. Pangkat/Golongan Pembina (IV/a) berjumlah 1 orang
- j. Pangkat/Golongan Pembina Tk I (IV/b) berjumlah 4 orang
- k. Pangkat/Gol. Pembina Madya Muda (IV/d) berjumlah 1 orang

Tabel 1.3.  
Pangkat/Golongan/Ruang

No	Pangkat/Gol	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Juru Tk I (I/d)	1	0	1
2	Pengatur Muda (II/a)	7	0	7
3	Pengatur (II/c)	1	0	1
4	Pengatur Tk I (II/d)	9	0	9
5	Penata Muda (III/a)	6	1	7
6	Penata Muda Tk I (III/b)	15	0	15
7	Penata (III/c)	2	1	3
8	Penata Tk I (III/d)	6	3	9
9	Pembina (IV/a)	1	0	1
10	Pembina Tk I (IV/b)	4	0	4
11	Pembina Utama Madya (IV/d)	1	0	1
	Jumlah	53	5	58

3. Jumlah Pejabat Struktural / fungsional :

- Kepala Dinas (eselon II.a) : 1 Orang
- Sekretaris (eselon III.a) : 1 Orang
- Kepala Bidang (eselon III.a) : 4 Orang
- Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi : 11 Orang
- Fungsional Pol PP : 14 Orang
- PPPK Damkar : 7 Orang
- Unsur Staf : 20 Orang

Tabel 1.4.  
Pejabat Struktural/Fungsional

No	Jabatan Struktural/Fungsional	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Eselon II a	1	0	1
2	Eselon III a	5	0	5
3	Eselon IV a	9	2	11

4	Fungsional Pol PP	14	0	14
5	Fungsional Damkar	7	0	7
	Jumlah	<b>36</b>	<b>2</b>	<b>38</b>

### C. Struktur Organisasi

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu perangkat daerah baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 041 Tahun 2020 tentang, Tugas, Fungsi dan uraian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang Ketentraman dan ketertiban umum serta kebakaran , uraian tugas tersebut adalah sebagai berikut:

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terdiri dari :

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- b. Sekretariat; terdiri dari :
  - Sub Bagian Keuangan dan Aset
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
- c. Bidang Pengembangan Kapasitas; terdiri dari :
  - Seksi Pengembangan Kapasitas Personel; dan
  - Seksi Bina Kesamaptaan.
- d. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah;
  - Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
  - Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- e. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
  - Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
  - Seksi Kerja Sama
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
  - Seksi Bina Satuan Linmas; dan
  - Seksi Pemadam Kebakaran
- g. Sedangkan Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari:
  - Sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian
  - Setiap jabatan fungsional dimaksud dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

- Jenis dan jenjang jabatan diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### **D. Isu Strategis SKPD**

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan/organisasi, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi di Indonesia menempatkan pentingnya rasionalisasi birokrasi yang menciptakan efesiensi, efektifitas, dan produktifitas melalui pembagian kerja hirarkikal dan horizontal yang seimbang, diukur dengan rasio antara volume atau beban tugas dengan jumlah sumber daya disertai tata kerja formalistik dan pengawasan yang ketat. Reformasi birokrasi juga merupakan langkah strategis membangun sumber daya aparatur negara yang profesional, memiliki daya guna dan hasil guna yang profesional dalam rangka menunjang jalannya pemerintah dan pembangunan nasional.

Penataan organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah didasarkan pada visi, misi dan sasaran strategis, agenda kebijakan, program dan kinerja kegiatan yang terencana dan diarahkan terbangunannya sosok birokrasi dengan tugas dan pertanggungjawaban terbuka dan aksesif. Penyederhanaan tata kerja dalam hubungan intra dan antar aparatur serta antar aparatur dengan masyarakat dan dunia usaha yang berorientasi pada kriteria dan mekanisme yang impersonal terarah pada penerapan pelayanan prima.

Berdasarkan beberapa permasalahan/kendala dalam upayanya memperluas dan meningkatkan pelayanan publik khususnya tugas pembantuan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta kebakaran, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan menentukan **isu strategis berdasarkan tugas dan fungsinya**, yaitu:

1. Kurangnya kesadaran/kepatuhan masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat
2. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran
3. Kurang maksimalnya pelayanan dan pengamanan terhadap ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan kebakaran.

##### **1. Faktor Internal**

###### **1. Analisis Lingkungan Internal**

Lingkungan internal terdiri dari dua faktor yakni kekuatan dan kelemahan dimana dengan melakukan analisis terhadap kekuatan dan kelemahan yang ada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi

Kalimantan Selatan dapat menentukan strategi yang tepat dengan memaksimalkan kekuatan yang dimiliki dan meminimalkan kelemahan bahkan memperbaiki kelemahan yang ada sehingga dapat menjadi kekuatan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan.

Kekuatan dan kelemahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatanyang telah teridentifikasi adalah sebagai berikut:

a. Kekuatan(Strenght)

1. Adanya Tugas pokok, fungsi dan kewenangan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaranyang jelas, hal ini di maksudkan agar seluruh jajaran personil Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugasnya berpegang pada tupoksi dan kewenangan yang di amanahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.
2. Adanya Personil/SDM Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Personil/SDM mutlak sangat di perlukan karena sebagai pelaksana fungsi manajemen dan operasional.
3. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang operasional Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Sarana dan prasana adalah alat penunjang keberhasilan tugas, oleh karenanya perlu mendapatkan perhatian, baik sarana prasarana dan fasilitas perkantoran maupun sarana dan prasarana serta fasilitas operasional lapangan.
4. Tersedianya anggaran/dana operasional Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Ketersediaan dana operasional mutlak di perlukan, karena tanpa ada dukungan dana akan sulit mencapai tujuan yang hendak di capai dalam sebuah organisasi.
5. Adanya uraian tugas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Uraian tugas merupakan pedoman bagi unsur pelaksana tugas agar dalam pelaksanaannya jelas dan tidak menjadi tumpang tindih, dalam arti siapa harus berbuat apa, di mana dan bagaimana, dan mengapa harus di kerjakan itu jelas.

b. Kelemahan(Weakness)

1. Jumlah personil kurang, jumlah personil dirasakan sangat kurang apabila di banding dengan tuntutan tugas yang diemban oleh Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang akan berpengaruh pada tingkat pencapaian kinerja. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan saat ini hanya memiliki personil sebanyak 54 orang, dari jumlah tersebut petugas operasional lapangan 30 orang. Berdasarkan analisis kebutuhan personil pada Satuan Polisi Pamong Praja dan

Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan, seharusnya memiliki personil minimal sebanyak 350 orang.

2. Rekrutmen dan penempatan personil belum sesuai kebutuhan, sistem rekrutmen dan penempatan personil Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang ada saat ini belum sesuai dengan ketentuan, baik dari segi pendidikan, kesehatan dan kemampuan seseorang. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mengemban tugas spesifik dan memiliki karakter yang berbeda dengan ASN pada umumnya. Oleh karena itu kedepan di perlukan tambahan personil dengan formasi khusus serta sistem penempatan dan pembinaan karier secara khusus (seleksi uji kompetensi dan tes psikologi).
3. Motivasi kerja dan penguasaan bidang tugas masih rendah, berdasarkan dari evaluasi personil yang di tempatkan pada Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan motivasi kinerja masih rendah, dikarenakan kemampuan pada bidang tugas, inisiatif dan responsive yang kurang.
4. Diklat keterampilan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran masih kurang, tuntutan tugas yang mengandung resiko cukup besar, personil Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran harus di bekali kemampuan dengan berbagai keterampilan dan keahlian melalui pendidikan, pelatihan, diklat teknis, bimbingan teknis dan lain sebagainya.
5. Sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang kerja masih terbatas, sarana dan prasarana dan fasilitas kerja sebagai penunjang kerja masih belum memenuhi standart keperluan, sehingga hasil kinerjanya masih belum optimal.
6. Gedung perkantoran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan saat ini belum memiliki gedung perkantoran sendiri, dimana masih menggunakan ruang gedung perkantoran dilingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

## **2. Faktor Eksternal**

### **2. Analisis Lingkungan Eksternal**

Lingkungan eksternal merupakan semua kekuatan yang timbul diluar Instansi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan, namun memberikan dampak terhadap pelaksanaan perencanaan Instansi. Lingkungan ini terdiri dari dua faktor yakni peluang dan ancaman sehingga dalam penentuan strategi yang dipilih harus memperhatikan bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mendukung memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan

ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta meminimalisir ancaman agar tidak menghambat pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun peluang ancaman yang diidentifikasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

1. Adanya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang pembentukan organisasi dan tatakerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan. Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, dan berdasarkan evaluasi di lapangan masih ditemukan Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur yang belum dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, sehingga perlu dilakukan penegakannya.
2. Adanya peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan. Ditetapkan didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengenai tugas pokok, fungsi, hak dan kewajiban serta kewenangan telah di atur di dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan pelaksanaan tugas juga telah di atur di dalam Permendagri, termasuk pakaian dinas serta perlengkapan dan peralatan kerja. Hal ini merupakan peluang untuk Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran secara maksimal dalam mengemban tugas.
3. Adanya dukungan dari DPRD dan Instansi terkait. Dukungan DPRD untuk dukungan legeslasi dan alokasi anggaran operasional.
4. Adanya dukungan masyarakat dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalim,antan Selatan. Tanpa adanya dukungan positif dari masyarakat, maka keberhasilan pelaksanaan tugas akan kurang optimal serta membawa dampak yang kurang baik.
5. Adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang perlu dilaksanakan dan ditegakan pelaksanaannya. Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur merupakan obyek yang harus dilaksanakan penegakannya oleh Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, sehingga dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang di harapkan.
6. Adanya dukungan program dan kegiatan dari Instansi terkait. Dengan adanya dukungan program dan kegiatan maka kinerja SKPD akan dapat dilaksanakan dengan baik.

Dari dua faktor yakni internal dan eksternal yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dapat dibuat sebuah matrik SWOT, matrik ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal

yang dihadapi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Matrik ini dapat menghasilkan empat kemungkinan alternatif strategis yang digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 6: Matrik SWOT Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan

Internal Eksternal	Strengths (S)	Weakness (W)
Opportunities (O)	Strategi(SO) Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi(WO) Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
Treaths (T)	Strategi(ST) Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Strategi(WT) Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Matriks SWOT ini menjadi dasar analisis strategi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan yang dibagi dalam empat strategi berdasarkan kombinasi kekuatan–peluang, kekuatan–ancaman, kelemahan–peluang dan kelemahan–ancaman yakni:

1. Strategi Kekuatan (Strength) – Peluang (Opportunity)

Pada strategi ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan perlu memaksimalkan kekuatan yang ada serta memanfaatkan peluang untuk mencapai hasil optimal, digambarkan dengan tabel berikut:

Tabel 7: Strategi Kekuatan (Strength) – Peluang (Opportunity)Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan

No	Internal	No	Eksternal
	Kekuatan (Strenght)		Peluang (Opportunities)
1	2	3	4
1.	Adanya visi dan Misi Satpol.PP dan Damkar yang jelas	1.	Adanya peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang keberadaan Satpol.PP dan Damkar
2.	Adanyatugas pokok, fungsi dan kewenangan yang jelas	2.	Adanya Perda Prov.Kalsel tentang pembentukan organisasi dan tatakerja Satpol.PP dan Damkar Prov.Kalsel
3.	Adanya uraian tugas Satpol.PP dan Damkar yang jelas	3.	Adanya dukungan dari DPRD dan Instansi terkait serta dukungan masyarakat dalam pelaksanaan tugas

4.	Adanya personil/SDM	4.	Adanya Perda dan Pergub yang perlu di dilaksanakan dan ditegakan pelaksanaannya
5.	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang operasional masih terbatas	5.	Adanya dukungan program dan kegiatan dari Instansi terkait

2. Strategi Kekuatan (Strength) – Ancaman (Threats)

Pada strategi ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan perlu memaksimalkan kekuatan yang ada untuk meminimalisir ancaman agar tidak menghambat pelaksanaan program yang telah direncanakan, digambarkan dengan tabel berikut:

Tabel 8: Strategi Kekuatan (Strength) – Ancaman (Threats) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan

No	Internal	No	Eksternal
	Kekuatan (Strenght)		Ancaman (Threats)
1	2	3	4
1.	Adanya visi dan misi Satpol.PP dan Damkar yang jelas	1.	Pelanggaran Perda dan Pergub
2.	Adanya tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang jelas	2.	Gangguan Tramtibum
3.	Adanya uraian tugas Satpol.PP dan Damkar yang jelas	3.	Kemampuan/kapasitas SDM
4.	Adanya personil/SDM	4.	Ketaatan dan kepedulian masyarakat
5.	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang operasional masih terbatas	5.	Koordinasi dan kerjasama dengan Instansi terkait
		6.	Arus globalisasi dan otonami daerah

3. Strategi Kelemahan (Weakness) – Peluang (Opportunity)

Pada strategi ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan perlu memanfaatkan peluang untuk meminimalisir kelemahan yang ada, digambarkan dengan tabel berikut:

Tabel 9: Strategi Kelemahan (Weakness) – Peluang (Opportunity)Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan

No	Internal	No	Eksternal
	Kelemahan (Weakness)		Peluang (Opportunity)
1	2	3	4



1.	Jumlah personil kurang	1.	Pelanggaran Perda dan Pergub
2.	Rekrutmen dan penempatan personil belum sesuai dengan kebutuhan	2.	Gangguan Tramtibum
3.	Kantor belum punya sendiri	3.	Kemampuan/kapasitas SDM
4.	Sarana dan prasarana fasilitas penunjang kerja masih terbatas.	4.	Ketaatan dan kepedulian masyarakat
5.	Motivasi kerja dan penguasaan bidang tugas rendah	5.	Koordinasi dan kerjasama dengan Instansi terkait
6.	Diklat peningkatan kapasitas Satpol.PP dan Damkar masih belum terpenuhi	6.	Arus globalisasi dan otonomi daerah

4. Strategi Kelemahan (Weakness) - Ancaman (Threats)

Pada strategi ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan perlu meminimalisir kelemahan dan menghindari ancaman sehingga pelaksanaan program berjalan lancar, digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 10: Strategi Kelemahan (Weakness)– Ancaman (Threats) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan

No	Internal	No	Eksternal
	Kelemahan (Weakness)		Ancaman (Threats)
1	2	3	4
1.	Jumlah personil kurang	1.	Pelanggaran Perda dan Pergub
2.	Rekrutmen dan penempatan personil belum sesuai dengan kebutuhan	2.	Gangguan Tramtibum
3.	Kantor belum punya sendiri	3.	Kemampuan/kapasitas SDM
4.	Sarana dan prasarana fasilitas penunjang kerja masih terbatas.	4.	Ketaatan dan kepedulian masyarakat
5.	Diklat peningkatan kapasitas Satpol.PP dan Damkar masih belum terpenuhi	5.	Koordinasi dan kerjasama dengan Instansi terkait
		6.	Arus globalisasi dan otonomi daerah

## **E. Sistematika Penyajian**

- Bab I      Pendahuluan berisi penjelasan singkat tentang latar belakang penyusunan, tugas pokok dan fungsi, urusan yang ditangani dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjalankan dan menjabarkan tugas pokok fungsi atas urusan yang ditangani.
- Bab II     Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menyajikan secara ringkas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021 – 2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun 2023, dan Penetapan Kinerja Tahun 2023.
- Bab III    Adalah akuntabilitas kinerja, menyajikan analisis pencapaian kinerja, keberhasilan dan kegagalan, sebagai pertanggungjawaban pencapaian hasil tahun 2023.
- Bab IV    Penutup, menjelaskan kesimpulan hasil menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

Era Reformasi dan globalisasi sekarang ini membawa dampak yang cukup berat pada penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat, dari tingkat pusat sampai daerah, yang bermuara pada tuntutan masyarakat banyak antara lain penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat secara transparan, baik bersih dan bebas dari KKN yang diwujudkan dengan akuntabilitas publik sebagai implementasi pelaksanaan Otonomi Daerah.

Salah satu alat yang digunakan untuk mengukur/menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan PP nomor 108 tahun 2000 diatas adalah Rencana Strategis (RENSTRA) Instansi Pemerintah. Dalam PP Nomor 108 tahun 2000 pasal 1 ayat (4) disebutkan Rencana Strategis (Renstra) adalah rencana lima tahunan, yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Program dan Kegiatan.

Rencana Strategis menjadi landasan dan pedoman bagi organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pelaksanaan Rencana Strategis pemerintah dituangkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja SKPD yang memuat APBD. PP No 105 Tahun 2000/Permendagri 13 Tahun 2006 mengatur daerah menyusun anggarannya dengan pendekatan kinerja. Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja atau output dan perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.

Komponen pelayanan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik disusun berdasarkan klasifikasi bidang kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam UU No 32 tahun 2004 dan UU No 33 tahun 2004.

Penyusunan arah dan kebijakan umum APBD pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Daerah, karena tingkat pencapaian atau kinerja pelayanan yang direncanakan dalam satu tahun anggaran pada dasarnya merupakan tahapan dan perkembangan dari kinerja pelayanan yang diharapkan dalam jangka menengah dan jangka panjang.

Dengan pendekatan kinerja, anggaran disusun berdasarkan sasaran yang hendak dicapai pada tahun anggaran, standar pelayanan, dan standar biaya. Setiap unit harus bisa merencanakan anggarannya berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi, tujuan dan sasaran tertentu yang disertai indikator yang jelas dan terukur, sehingga

setiap jenjang dalam unit kerja akan mempunyai tanggung jawab yang jelas. Anggaran kinerja menghubungkan secara jelas kegiatan dengan input, output, dan hasil yang diharapkan. Melalui proses anggaran kinerja, pemerintah daerah menetapkan output dan hasil dari tiap program dan aktivitas pelayanan.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengatakan bahwa perencanaan strategis merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang dihadapi dalam milenium ketiga ini.

Perencanaan strategis ini memberikan gambaran kedepan tentang bagaimana suatu lembaga dapat berjalan dengan baik menuju tujuan, sesuai visi dan misinya dengan memanfaatkan kembali internal dan membenahi kelemahan-kelemahan internal, dalam rangka mengisi peluang dan ancaman yang ada.

Oleh karena itu dalam rangka mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal organisasi, serta untuk memenuhi kewajiban sebagai salah satu Instansi Pemerintah, maka disusunlah Renstra ini yang sekaligus dapat dijadikan sebagai pemandu arah dan pedoman serta langkah dan arah dalam melakukan pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026

Maksud disusunnya Rencana Strategis tahun 2021-2026 ini adalah sebagai pedoman untuk mencapai tujuan, baik jangka pendek, maupun jangka menengah, dengan mengarahkan seluruh dimensi dan potensi yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan, dengan mengintegrasikan seluruh kemampuan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Secara spesifik tujuan penyusunan Renstra Tahun 2021-2026 adalah:

- a. Memperkuat konsistensi perencanaan dengan pemilihan program dan kegiatan prioritas yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang ada.
- b. Mewujudkan komitmen terhadap program yang disepakati dari kegiatan yang telah dibahas secara partisipatif dengan stakeholders (pihak-pihak terkait).
- c. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara sistematis, kronologis dan berkelanjutan secara sinergis.

Adapun Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2021-2026 Provinsi Kalimantan Selatan disusun berdasarkan:

- a) Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2021-2026
- b) RPJMD tahun 2021-2026 Provinsi Kalimantan Selatan
- c) Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan

Renstra ini juga disusun sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan selama 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, dan sekaligus sebagai tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan organisasi.

## 1. Visi dan Misi

### *Visi*

**KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan)  
SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA**

### *Misi*

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur.
2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata.
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian.
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus pada Pelayanan Publik.
5. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana.

## 2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran dari penjabaran visi dan misi Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan adalah :

### 1. Tujuan

- a. Melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan pelaksanaanya.
- b. Menyenggarakan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat.
- c. Perlindungan masyarakat.

### 2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dan tujuan secara terukur, yang akan dicapai secara nyata dalam waktu tertentu, bulanan, semester atau tahunan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Sebagai langkah untuk mencapai tujuan, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kepatuhan masyarakat dan aparaturnya terhadap produk hukum
- b. Meningkatkan peran petugas penegak produk hukum dalam penyidikan dan penyelidikan
- c. Meningkatkan penyelesaian permasalahan ketentraman dan ketertiban umum
- d. Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat/Aparatur dan Lembaga/Organisasi Terhadap Peraturan mengenai Ketertiban Umum

- e. Peningkatan pemenuhan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- f. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Prov.Kalsel
- g. Meningkatkan responsibilitas terhadap penanganan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, bahaya kebakaran dan bencana
- h. Meningkatkan responsibilitas terhadap penanganan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, bahaya kebakaran dan bencana

### **3. Kebijakan**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan mencoba menempuh berbagai kebijakan yang akan dilaksanakan antara lain :

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur
- 2) Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dan Pelaksanaannya serta implementasi di Lapangan
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas perlengkapan dan peralatan
- 4) Meningkatkan kerja dengan kab/kota serta instansi terkait maupun dengan seluruh komponen masyarakat dalam pembinaan kesadaran hukum.

#### **A. Rencana Kerja Tahun 2023**

Program Kerja dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 yang bersumber dari dana Belanja Langsung APBD Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari 3 (tiga) Program dan 11 (sebelas) Kegiatan serta 34 (tiga puluh empat sub kegiatan adalah sebagai berikut:

**Program rutin SKPD terdiri dari 1 Program, 7 Kegiatan dan 17 Sub Kegiatan antara lain:**

- 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
  - 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
  - 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - b) Pengadaan Mebel
  - c) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

**Program prioritas pembangunan fungsi penunjang urusan pemerintahan terdiri dari 2 Program, 4 Kegiatan dan 17 SubKegiatan antara lain:**

- 1. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
  - 1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
    - a) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
    - b) Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
    - c) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
    - d) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
    - e) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
    - f) Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
    - g) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum

- h) Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
- i) Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
- 2. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
  - a) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
  - b) Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
  - c) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
- 3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
  - a) Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
  - b) Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditepat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS
- 2. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
  - 1. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
    - a) Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran
    - b) Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
    - c) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

**B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

**1. Eselon II**

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran  
Provinsi Kalimantan Selatan**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	Tingkat Kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah	Baik
2.	Meningkatnya Kesadaran masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran	Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran	Baik



3.	Meningkatnya Penyusunan Perencanaan dan Program, Pengelola Keuangan dan Aset dan Penyelenggaraan Urusan Umum dan Administrasi Kepegawaian serta SDM pada tatanan SKPD.	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja SKPD	Baik
----	--	--	------

No.	Program	Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Rp. 11.151.669.590
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 18.166.663.765
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Rp. 4.694.032.300
Jumlah		Rp. 34.012.365.655

2. Eselon III

a. Kepala Bidang Penegak Produk Hukum Daerah

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat/Aparatur Terhadap Produk Hukum Daerah dan Peraturan Gubernur	Persentase masyarakat dan aparatur yang memahami dan mematuhi tentang produk hukum daerah	100%
2	Meningkatkan Peran petugas penegak produk hukum dalam penyelidikan dan penyidikan	Persentase aparatur yang memahami tentang peraturan trantibum	100%
No.	Program/Kegiatan		Anggaran
1	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat		Rp. 15.609.800
2	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Rp. 60.000.000
3	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		Rp. 88.348.100
4	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		Rp. 98.666.900
5	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		Rp. 126.035.800
6	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS		Rp. 80.000.000
Jumlah			Rp. 468.660.600

b. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan responsibilitas terhadap penanganan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, bahaya kebakaran dan bencana	Persentase Responsibilitas Aparatur Satlinmas dan Damkar Kab/Kota yang Sigap dan Terampil	100%
2	Meningkatkan Peran Satlinmas dan Damkar	Persentase Satlinmas dan Damkar Kab/Kota yang Aktif Dalam Penanganan Ketertiban umum, Bahaya Kebakaran dan Bencana	100%
No.	Program/Kegiatan		Anggaran
1	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi		Rp. 100.000.000
2	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum		Rp. 774.999.800
3	Penyediaan dan Pemuktahiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran		Rp. 200.000.000
4	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota		Rp. 2.503.121.300
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		Rp. 1.990.911.000
Jumlah			Rp. 5.569.032.100

c. Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Peningkatan Pemenuhan Sumberdaya Aparatur Satpol PP dan Damkar	Persentase aparatur Pol. PP, Linmas dan Damkar yang bersertifikat	100%
2	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Aparatur ( Satpol PP, Linmas dan Damkar ) Prov Kal Sel	Persentase anggota Satpol PP dan Damkar yang meningkat klasifikasi	100%
No.	Program/Kegiatan		Anggaran
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Rp. 156.380.000
2	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		Rp. 1.026.183.585
3	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		Rp. 50.000.000
Jumlah			<b>Rp. 1.232.563.585</b>

d. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan Penyelesaian Permasalahan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Ketertiban Umum yang Berhasil Ditindak Lanjuti	100%

2	Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat/Aparatur dan Lembaga/Organisasi Terhadap Peraturan mengenai Ketertiban Umum	Persentase Masyarakat/Aparatur yang Memahami Tentang Peraturan Ketertiban Umum	100%
No.	Program/Kegiatan	Anggaran	
1	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Rp. 15.323.284.630	
2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Rp. 99.996.400	
3	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Rp. 99.999.750	
4	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 223.539.000	
Jumlah			Rp. 15.746.819.780

e. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan dan pelaporan kinerja	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Satpol PP dan Damkar	100%
2	Pelayanan sarana prasarana dan administrasi perkantoran	Persentase Aset yang tercatat	100%
3	Peningkatan Kualitas SDM Satpol PP dan Damkar	Persentase anggota Satpol PP dan Damkar yang memiliki sertifikat keahlian	100%
4	Pelayanan Administrasi Keuangan	Persentase Penyerapan Anggaran Satpol PP dan Damkar Prov. Kalsel	100%
No.	Program/Kegiatan	Anggaran	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 10.610.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 6.510.300	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 8.732.210.390	
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 186.600.000	
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 48.000.000	
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 323.200.000	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 15.697.900	
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 9.500.000	
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 410.597.000	
10	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 342.680.000	
11	Pengadaan Mebel	Rp. 27.000.000	
12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 157.450.000	

13	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 34.880.000
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 155.700.000
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 226.734.000
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 307.920.000
Jumlah		Rp. 10.995.289.590

**f. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Sosialisasi Produk Hukum Daerah dan Peraturan Gubernur Terkait Sanksi dan Administrasi dan Pidana	Jumlah produk hukum yang disosialisasikan	2 Produk Hukum
		Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisai tentang produk hukum	100 orang
2	Pembinaan sekretariat PPNS	Jumlah PPNS yang dibina	13 Kab/Kota
No.	Kegiatan		Anggaran
1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		Rp. 88.348.100
2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		Rp. 98.666.900
3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		Rp. 126.035.800
Jumlah			Rp. 313.050.800

**g. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Penyelenggaraan Penegakan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Produk Hukum Daerah dan Peraturan Gubernur yang Ditegakkan	2 Produk Hukum Daerah
2	Fasilitasi permasalahan terhadap pelanggaran produk hukum	Jumlah Permasalahan/Pelanggaran Produk Hukum Daerah dan Peraturan Gubernur yang Difasilitasi/Mediasi	100 Orang
No.	Kegiatan		Anggaran
1	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat		Rp. 15.609.800
2	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Rp. 60.000.000
3	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS		Rp. 80.000.000
Jumlah			Rp. 155.609.800

**h. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Pembinaan Pada Sumber Daya Aparatur Satlinmas	Persentase SDM Yang Terampil dalam Dalam Penanganan	100 %

		Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Bencana dan Sosial	
2	Sosialisasi Daerah Rawan Bencana dan Masalah Sosial	Jumlah Aparatur yang memiliki pengetahuan atas daerah rawan bencana dan masalah sosial	75 aparaturn satlinmas
No.	Kegiatan		Anggaran
1	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi		Rp. 100.000.000
2	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum		Rp. 774.999.800
Jumlah			Rp 884.999.800

i. Kepala Seksi Pemadam Kebakaran

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Pembinaan Pada Sumber Daya Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Terampil	8 Orang
2	Fasilitasi Penanganan Bahaya Kebakaran dan Dampak Kebakaran	Persentase kejadian kebakaran dan dampak kebakaran yang ditangani	100%
3	Monitoring Wilayah Rawan Kebakaran dan Dampak Kebakaran yang Dimonitor	Jumlah Kab/Kota yang Tanggap Penanganan Bahaya Kebakaran	13 kab/kota
No.	Kegiatan	Anggaran	
1	Penyediaan dan Pemuktahiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Rp. 200.000.000	
2	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Rp. 2.503.121.300	
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Rp. 1.990.911.000	
Jumlah		Rp 4.694.032.300	

j. Kepala Seksi Bina Kesamaptaan

NÓ	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Pelatihan Kesamaptaan Satpol PP dan Damkar	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang Lulus Kesamaptaan	36 Org
2	Pemeriksaan Jasmani Bagi Satpol PP dan Damkar	Jumlah Personil Yang Lulus standar jasmani Satpol PP & Damkar	36 Org
No.	Kegiatan		Anggaran
1	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		Rp. 997.890.775
Jumlah			Rp 997.890.775

k. Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Personil

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Pelatihan Kemampuan Satpol PP dan Damkar Prov.Kalsel	Jumlah Aparatur Satpol PP dan Damkar yang lulus Pelatihan kemampuan Teknis	65 Org

2	Melaksanakan Uji Kompetensi Bagi Satpol PP dan Damkar Prov.Kalsel	Persentase kelulusan Uji Kompetensi Bagi Satpol PP dan Damkar Prov Kalsel	100%
3	Memberikan Fasilitas Pengembangan SDM Satpol PP dan Damkar Kab/Kota	Jumlah Aparatur Satpol PP dan Damkar Kab/Kota yang terfasilitasi dalam Pengembangan SDM(Ket.orang/Pejabat pada Kab/Kota terkait penyelenggaraan SDM Satpol PP & Damkar	36 Org
No.	Kegiatan		Anggaran
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Rp. 156.380.000
2	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		Rp. 50.000.000
Jumlah			Rp. 206.380.000

I. Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Patroli Pengamanan Objek Vital Pemerintah Provinsi dan Pengamanan serta Pengawasan Pejabat Negara	Jumlah Wilayah yang Dilaksanakan Patroli gabungan dengan satpol pp kabupaten/kota	13 kab/kota
		Jumlah Objek Vital dan Pejabat yang Diamankan	7 objek
2	Sosialisasi Trantibum	Jumlah kegiatan sosialisasi lapangan pada patroli yang dilaksanakan	26 Keg
No.	Kegiatan		Anggaran
1	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan		Rp. 15.323.284.630
2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		Rp. 99.996.400
3	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Rp. 223.539.000
Jumlah			Rp. 15.646.820.030

m. Kepala Seksi Kerjasama

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Memfasilitasi Permasalahan Trantibum	Persentase Permasalahan Trantibum yang Di Tindaklanjuti	100%
No.	Kegiatan		Anggaran
1	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan		Rp. 99.999.750
Jumlah			Rp. 99.999.750

n. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4



1	Penyusunan Perencanaan dan Administrasi Satpol PP dan Damkar Prov. Kalsel	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Secara Berkala	1 laporan
2	Merencanakan Sarana dan Prasarana serta Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Pencatatan Aset	1 laporan
No.	Kegiatan	Anggaran	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 8.732.210.390	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 186.600.000	
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 48.000.000	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 15.697.900	
5	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 155.700.000	
Jumlah		Rp. 9.138.208.290	

o. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Mengelola Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi Perkantoran dan Kepegawaian	59 Dok
2	Melaksanakan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas SDM	20 orang
No.	Kegiatan	Anggaran	
1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.	9.500.000
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	410.597.000
3	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.	342.680.000
4	Pengadaan Mebel	Rp.	27.000.000
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.	157.450.000
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.	226.734.000
7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.	307.920.000
Jumlah		Rp	1.481.881.000

p. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Menyusun Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Jumlah dokumen Kinerja yang disusun sesuai ketentuan	5 lap
No.	Kegiatan		Anggaran
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp. 10.610.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Rp. 6.510.300
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp. 323.200.000
4	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp. 34.880.000
Jumlah			Rp. 375.200.300

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi**

Untuk mengukur kinerja organisasi Perangkat Daerah, Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi enam kategori sebagai berikut :		
Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 90%	Sangat Memuaskan
II	Diatas 80% s.d. 90%	Memuaskan
III	Diatas 70% s.d. 80%	Sangat Baik
IV	Diatas 60% s.d. 70%	Baik
V	Diatas 50% s.d. 60%	Cukup
VI	Kurang dari 50%	Kurang

**1. Sasaran Indikator Tujuan SKPD**

NO	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	Tingkat Kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah	100%	96,66%	100%
2	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran	Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran	61%	100%(149 kejadian)	100%
3	Meningkatnya Penyusunan Perencanaan dan Program, Pengelola Keuangan dan Aset dan Penyelenggaraan Urusan Umum dan Administrasi Kepegawaian serta	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja SKPD	100%	100%	100%



	SDM pada tatanan SKPD.				
Rata-rata Capaian					98.89%

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2023		
		2021	2022	target	Realisasi	% Capaian
1	Tingkat Kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah	79,83%	91.07%	100%	96.66%	Baik
2	Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran	35%(43 Kejadian )	100%(153 Kejadian )	61%	100%(149 Kejadian )	Baik
3	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja SKPD		100%	100%	100%	Baik
Rata-rata Capaian						Baik

I. Capaian Kinerja Eselon II

Unsur yang berperan dan menjiwai arah dan tujuan pembangunan nasional yang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2016-2021 bertujuan untuk mewujudkan visi “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan, selaku Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki tugas utama membantu Gubernur/Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Wajib Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana amanah Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, ditetapkan 2 Indikator kinerja utama Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah
- b. Meningkatkan kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran
- c. Meningkatnya Penyusunan Perencanaan dan Program, Pengelola Keuangan dan Aset dan Penyelenggaraan Urusan Umum dan Administrasi Kepegawaian serta SDM pada tatanan SKPD.

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Perbandingan realisasi dengan target terlihat berdasarkan table berikut :

Berdasarkan Renstra 2022 s/d 2023

No.	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2022 (%)	Realisasi 2022 (%)	Target RPJMD 2023 (%)	Realisasi 2023 (%)
1.	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Produk hukum daerah	100	100	100	96,66
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran dan non kebakaran	60	100	61	100

a. Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah

Dalam Mencapai Realisasi Indikator Kinerja Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah, berbagai upaya telah dilakukan, terutama melalui peningkatan efektivitas dan intensitas penyuluhan Produk Hukum Daerah melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Bidang pada SATPOL PP & DAMKAR, serta Upaya meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Aparatur SATPOL PP & DAMKAR.

Atas hasil kinerja dan upaya tersebut, terlihat pada Tabel diatas bahwa capaian Kinerja Organisasi SATPOL PP & DAMKAR Prov.Kalsel selalu terpenuhi dari tahun ke tahun. Penurunan angka realisasi/cakupan masyarakat yang terlayani atas gangguan TRANTIBUMLINMAS mengalami penurunan, dikarenakan jumlah angka kejadian/aduan gangguan trantibumlinmas menurun.

b. Meningkatkan kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran.

Dalam Mencapai Realisasi Meningkatkan kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja melalui Bidang LINMAS dan Pemadam Kebakaran telah melakukan kinerjanya dengan baik. Adapun upaya prioritas yang dilakukan adalah pembinaan Aparatur SATLINMAS se- Kalsel, dan tenaga pendukung penanganan KARHUTLA dan penyelamatan, dengan selalu berkoordinasi dengan instansi terkait dalam mitigasi dan penanganan bencana. Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat, kegiatan sosialisasi dan penyuluhan secara intensif dilakukan, dengan mensosialisasikan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum dari Pemerintah Pusat mengenai Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat

terhadap peraturan perundang-undangan serta ancaman sanksi pidana atas pembakaran hutan dan lahan, diharapkan angka kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Selatan dapat menurun dari tahun ke tahun.

Meningkatnya Kepatuhan masyarakat terhadap bahaya kebakaran merupakan salah satu factor yang dapat menekan angka kebakaran hutan lahan dan permukiman, factor alam (musim kemarau) kadangkala tidak dapat diantisipasi, sehingga pada musim kemarau kejadian kebakaran hutan dan lahan tidak dapat diprediksi dan diantisipasi secara maksimal.

Pada tahun 2023 Satpol PP&Damkar Provnsi Kalimantan Selatan meinventasir angka kejadian Kebakaran dan penyelamatan yang ditangani, hal ini dikarenakan selama tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Selatan intensitas iklim/cuaca didominasi cuaca/iklim hujan, sehingga tidak terjadi bencana KARHUTLA yang parah,yang agak rawan adalah daerah pemukiman penduduk. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2021-2023), hal ini terlihat dari table berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2023	
	2021	2022	Target	Realisasi
Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran	120 Kejadian	120 Kejadian	61%	100%(149 Kejadian)

Penambahan Penanganan kejadian pada target tahun 2023 tidak lepas dari keberhasilan penyelenggaraan sosialisasi dan penyuluhan serta kondisi cuaca di tahun 2023 yang tidak menentu (Pancaroba), dan agak rawan di pemukiman penduduk dari jumlah persentase jumlah kebakaran di Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Perbandingan Realisasi dengan Target Terkait

Dalam mencapai realisasi dan target organisasi perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tidak lepas dari sinkronisasi tugas, peran, fungsi dan koordinasi seluruh Bidang pada SATPOL PP & DAMKAR Prov.Kalsel. Dengan meningkatnya Peran Sekretariat, Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Personil, serta Sinkronisasi antara Bidang Teknis Penegakan Produk Hukum Daerah, TIBUM dan TRANMASY serta LINMAS dan DAMKAR, capaian kinerja SATPOL PP & DAMKAR terus meningkat dari tahun sebelumnya.

Realisasi kinerja SATPOL PP dan DAMKAR pada tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2023		
		2022	Target	Realisasi	% Capaian
1	Tingkat Kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah	91.07%	100%	96,66%	100%
2	Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran	100% (153 Kejadian )	61%	100% (149 Kejadian )	100%

Capaian kinerja organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan menunjang terlaksana dan terselenggaranya misi Kepala Daerah **Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus pada Pelayanan Publik;**

Capaian atas hasil kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2023 juga merupakan salah satu SPM Penyelenggaraan urusan Wajib TRANTIBUMLINMAS Provinsi yang dilaporkan kepada pemerintah pusat melalui indicator pencapaian SPM Sebagai berikut :

TABEL PENGHITUNGAN  
SPM URUSAN TRANTIBUM LINMAS PADA SATPOL PP & DAMKAR  
PROV.KALSEL TAHUN 2023

(Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakkan hukum Perda dan Perkada di Provinsi)

PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
IP Mutu SOP	=	$\frac{8}{8}$	$\frac{\text{Dokumen}}{\text{Dokumen}}$	= 100%
IP Mutu SDM	=	$\frac{293}{400}$	$\frac{\text{Orang}}{\text{Orang}}$	= 73%
IP Mutu Sarpras	=	$\frac{60}{100}$	$\frac{\text{Unit}}{\text{Unit}}$	= 60%
IP Pelayanan Dampak	=	$\frac{1}{1}$	$\frac{\text{Dokumen}}{\text{Dokumen}}$	= 100%

PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR				
IP Penerima Layanan Dasar	=	$\frac{3714}{3714}$	$\frac{\text{Orang}}{\text{Orang}}$	= 100%

PERHITUNGAN IP SPM MUTU LAYANAN DASAR & PENERIMA LAYANAN DASAR									
					BOBOT				
					T				
Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar	=	$\frac{100\% + 73\% + 60\% + 100\%}{4}$	=	83%	x	20%	=	16,66%	
Persentase Pencapaian Penerimaan Layanan Dasar	=	$\frac{100\%}{1}$	=	100%	x	80%	=	80,00%	

INDEKS PENCAPAIAN SPM (IP SPM)	=	16,66%	+	80,00%	=	96,66%
--------------------------------	---	--------	---	--------	---	--------

Kenaikan angka capaian realisasi Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan dari penegakkan hukum Perda dan Perkada di Provinsi jika dibandingkan dengan pencapaian tahun lalu (lihat lampiran) dikarenakan oleh dukungan dan keaktifan jumlah PPNS Penegak PERDA pada SATPOL PP & DAMKAR Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan.. (Jumlah PPNS Penegak Perda Tahun 2023 sebanyak 44 orang, dan pada Tahun 2022 sebanyak 44 orang). Yang seharusnya Kepala Daerah kab/kota mempersiapkan tenaga PPNS minimal 7 orang untuk mencapai target yang diarahkan Kemendagri Pusat. Dengan keterbatasan tenaga PPNS Penegak PERDA, yang memiliki kewenangan untuk melakukan proses penyidikan dan penyelidikan atas gangguan TRANTIBUMLINMAS serta penegakan PERDA PERKADA, hal ini yang

mengakibatkan proses tindak lanjut atas aduan gangguan/penindakan TRANTIBUMLINMAS tidak terhambat.

Berkurangnya Jumlah PPNS Penegak PERDA di Kabupaten/Kota disebabkan oleh rotasi/mutasi pejabat struktural dan non struktural dan memasuki masa usia pensiun. Pada tahun 2023, penguatan PPNS melalui penambahan personil PPNS sesuai standar minimal serta peningkatan kapasitas PPNS akan dilaksanakan secara berkala.

### **3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja**

Peningkatan dan penurunan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah terlihat dari keberhasilan peyelenggaraan/pelaksanaan Program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada organisasi.

#### **3.1. Upaya-Upaya Yang telah Dilakukan**

Pada Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan alokasi dana sebesar Rp.18.166.663.765,- dengan realisasi Rp. 17.595.805.155,- atau 96,85% sedangkan fisik 100%, walaupun pada umumnya program ini kebanyakan membayar honor petugas operasional/ jaga/ petugas pendukung kantramtibmas dari non PNS yang berjumlah 198 orang tetapi kegiatan ini dalam rangka untuk menciptakan suatu kondisi ketentraman dan ketertiban umum baik berupa Pengamanan/ penegakkan Peraturan Daerah atau kegiatan Patroli wilayah serta Patroli Damkar sehingga diharapkan situasi yang kondusif di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota baik pada saat Pilkada serentak atau situasi biasa-biasa (tidak pada Pilkada) juga keadaan masyarakat yang aman, tertib dan terkendali yang merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat dalam upaya untuk lebih meningkatkan ekonomi/kehidupan. Hal itu akan dapat tercapai apabila tugas yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Prov. Kalsel dapat secara optimal dilaksanakan dilapangan, disinilah peran dan tugas dari Bidang Pengendalian Operasional untuk dapat mengendalikan dan menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah dapat ditegakkan dengan baik.

Diharapkan masyarakat lebih pemahaman tahu terhadap hukum dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Hukum/PERDA,PERGUB dapat meningkat dari tahun ke tahun, karena karakter Perda yang mendorong masuknya investasi ke daerah akan membawa keberuntungan atau paling tidak diharapkan dapat ikut meningkatkan pendapatan asli daerah berdasarkan UU No. 12 Tahun 2008

Program ini terdiri dari kegiatan berupa :

Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan anggaran Rp.17.723.612.965, dengan realisasi sebesar Rp. 17.228.162.584 kinerja Kegiatan ini adalah terciptanya keadaan yang aman dan terkendali pada kegiatan-kegiatan masyarakat dan pejabat berupa :

Pengamanan Aset Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Lokasi :

1. Rumah Dinas Gubernur Kalimantan Selatan
2. Rumah Dinas Wakil Gubernur Kalimantan Selatan
3. Rumah Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
4. Kantor SETDA Provinsi Kalimantan Selatan
5. Kantor Gubernur Lama
6. RS Ansari Saleh

Output : Pada Lokasi/Aset/Objek Vital Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan Penjagaan oleh Anggota Satpol.PP dan Damkar Prov.Kalsel dengan system shift.

Selama dilaksanakan tugas Piket/Penjagaan tersebut, keadaan di lokasi aman dan terkendali.

Kegiatan Pengamanan Gubernur/Wakil Gubernur Kalsel Pada Setiap Acara/Kegiatan yang dihadiri, lokasi : Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, waktu : Periode Bulan Januari s/d Desember 2023

Output : Selama dilaksanakan Pengamanan, kegiatan yang dihadiri oleh Gubernur/Wakil Gubernur Kalsel berjalan lancar dan aman terkendali.

Pada Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Selatan diberikan kepercayaan menjadi salah satu tuan rumah pelaksanaan acara MTQ Nasional yang ke 29. Yang mana tempat dilaksanakannya kegiatan MTQ Nasional tersebut diselenggarakan di 3 daerah berbeda yaitu Kota Banjarbaru, Kab. Banjar dan Kota Banjarmasin. Satpol PP & Damkar Provinsi Kalimantan Selatan menjadi pendukung atau koordinator keamanan dan ketertiban umum terhadap pelaksanaan MTQ tersebut pada tahun 2023, dan Satpol PP & Damkar Provinsi Kalimantan Selatan bersinergi dengan pihak Kepolisian RI dan TNI dalam hal keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya penyelenggaraan MTQ Nasional tersebut.

Selama tahun 2023 kegiatan-kegiatan berjalan dengan aman, lancar dan terkendali karena dalam pelaksanaannya juga dibantu dari Pihak POLRI dan TNI, namun begitu, program kegiatan lainnya sebagai kegiatan penunjang/pendukung berperan penting seperti Kegiatan ; Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,

Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan, Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa, Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum, Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia, Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada, Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS, Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS, Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran, Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta sub sub kegiatan yang ada di sekretariat.

**TABEL**  
**JUMLAH PATROLI TRANTIBUM DAN TRANMASY**  
**DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021-2023**

URAIAN	TAHUN			% (2021-2023)
	2021	2022	2023	
Patroli TRANTIBUM	16.000 Patroli	16.000 Patroli	16.000 Patroli	100%
Patroli DAMKAR	420 Patroli	420 Patroli	420 Patroli	100%

Sumber : Bid. Ops dan Damkar Satpol.PP dan Damkar 2023

Pelaksanaan Patroli Trantibum dan Damkar Hal ini tentunya perlu terus dilaksanakan dan dibina bahkan dikembangkan sebagai salah satu cara



konkrit menciptakan keadaan masyarakat dan daerah yang tertib dan aman terkendali.

1) Peningkatan/sosialisasi/koordinasi trantibum terhadap aparat Satpol PP Kab/Kota, Satlinmas Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan

Negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk melaksanakan kegiatan pembangunan untuk meningkatkan perekonomian khususnya di era reformasi Demokrasi keterbukaan saat ini khususnya saat akan menghadapi Pilkada dan Pemilu serentak tahun 2024 diharapkan masyarakat yang berbeda pilihan tetap bersatu menjaga per NKRI. Disinilah juga diharapkan peran peting Satpol.PP dan Damkar untuk menjaga ketentraman dan keteriban umum baik perannya sebagai lembaga maupun sebagai anggota masyarakat, merespon, mendeteksi, dan mengantisipasi gejala ketentraman dan keteriban umum lebih dini, maupun sub peran satlinmas yang juga saat ini menjadi bagian dari Satpol.PP dan Damkar diharapkan menjadi pioneer dilingkungan atau informan kepada aparat keamanan lainnya yang bertugas menjaga kondisi ketentraman dan keteriban umum serta tanggap bencana atau musibah berupa banjir atau bahaya kebakaran lingkungan perumahan dan hutan.

Sejumlah potensi yang mendukung upaya menciptakan ketentraman dan keteriban umum adalah, antara lain:

- a) Peran serta masyarakat dalam memahami Tingkat kepatuhan terhadap produk hukum daerah.
- b) Tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran dan non kebakaran.
- c) Juga partisipasi unit kerja pendukung penegak peraturan perundang-undangan seperti TNI/ Polri, kejaksaan dll

### **3.2. Hambatan dalam Pencapaian Kinerja**

Pada Tahun 2023 meski PPKM masih berlaku tidak seketat seperti tahun sebelumnya, yang mana Tahun 2021 merupakan tahun yang berat bagi Indonesia, tidak terkecuali Provinsi Kalimantan Selatan, Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak awal tahun 2021, tidak lantas mengurangi kinerja SATPOL PP & DAMKAR dalam pelaksanaan tugas. Hal ini justru menambah beban tugas yang mau tidak mau harus dilaksanakan oleh Personil SATPOL PP & DAMKAR di Lapangan. Dengan adanya dari Pemerintah Pusat maupun Gubernur, peran SATPOL PP & DAMKAR justru harus berada di depan, dalam rangka Penanggulangan dan pencegahan Penularan virus COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam melaksanakan pencapaian kinerja organisasi Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah dan Meningkatkan kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran, hambatan yang dialami oleh organisasi antara lain :

- 1) Kurangnya dukungan anggaran kegiatan untuk meningkatkan intensitas penyuluhan/sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan untuk memenuhi kualifikasi masyarakat dan aparatur yang memahami dan mematuhi tentang produk hukum daerah
- 2) Kurangnya dukungan anggaran kegiatan untuk melaksanakan penegakan PERDA dan PERKADA.
- 3) Kurangnya dukungan OPD terkait dalam penegakan PERDA dan PERKADA. Produk Hukum daerah dilaksanakan oleh masing-masing OPD teknis, namun Produk Hukum inisiatif OPD tersebut tidak melibatkan SATPOL PP selaku Penegak Produk Hukum Daerah.
- 4) Pada setiap Pelaksanaan Kegiatan Pasti ada Kendala Teknis Baik Sebelum Pelaksanaan, dalam Pelaksanaan dan Setelah Pelaksanaan Kegiatan. Dalam Pelaksanaan Kegiatan Biasanya yang sering menjadi kendala berupa kurangnya jumlah Petugas Operasional dan terbatasnya sarana operasional lapangan yang dalam hal ini adalah kendaraan operasional untuk mobilitas anggota di Lapangan.
- 5) Kurangnya jumlah personil yang berkualifikasi pendidikan minimal S1 (Strata 1) pada Satpol PP & DAMKAR Prov.Kalsel. mengingat bahwa hampir semua jenis DIKLAT yang diselenggarakan oleh KEMENDAGRI (Terkait peningkatan Kapasitas SATPOL PP & DAMKAR) mengharuskan berpendidikan minimal S1.
- 6) Kurangnya dukungan anggaran pendidikan dan pelatihan pada SATPOL PP & DAMKAR untuk memenuhi kualifikasi teknis SATPOL PP & DAMKAR sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 7) Masih minimnya Sarana dan Prasarana yang dimiliki organisasi SATPOL PP & DAMKAR, sebagaimana SARPRAS Minimal yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan TRANTIBUMLINMAS maupun PEMADAM KEBAKARAN & Penyelamatan.
- 8) Bencana kebakaran hutan, lahan dan permukiman merupakan suatu hal yang tidak dapat diprediksi terlebih disaat perubahan cuaca yang ekstrem.

### **3.3. Rencana Tindak Lanjut**

Dalam rangka meningkatkan kinerja serta meminimalisir hambatan kinerja Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, ditetapkan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

- 1) Menetapkan Rencana Kinerja di tahun berjalan dan tahun yang akan datang dengan memaksimalkan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien serta skala prioritas kebutuhan organisasi dalam meningkatkan pencapaian kinerja organisasi.
- 2) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Instansi terkait, dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta bahaya kebakaran di Provinsi Kalimantan Selatan.
- 3) Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait khususnya SKPD di Kab/Kota, dalam hal penegakan PERDA dan PERKADA yang diampu oleh masing-masing SKPD teknis, agar kepatuhan masyarakat terhadap PERDA dan PERKADA dapat terus meningkat.
- 4) Merencanakan program dan kegiatan peningkatan/pengembangan kapasitas Personil berdasarkan skala prioritas kebutuhan organisasi
- 5) Memaksimalkan pemberdayaan SDM pada Satpol PP & DAMKAR Prov.Kalsel sesuai bidang teknis

4. Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian Indikator Kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan program program yang dilaksanakan selama tahun 2022, yaitu :

- a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
  - Kegiatan : Penegakan Peraturan daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
  - Sub kegiatan :
    - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur,
    - Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur,
    - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

II. Capaian Kinerja Eselon III

1. Kepala Bidang Penegak Produk Hukum Daerah

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap	Meningkatkan kepatuhan masyarakat dan aparatur terhadap produk hukum	100%	100%	100%

	Produk Hukum Daerah	Meningkatkan peran petugas penegak produk hukum dalam penyidikan dan peyelidikan	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian					100%

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2023		
		2022	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Masyarakat dan Aparatur Yang Memahami dan Mematuhi Tentang Produk Hukum Daerah	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Petugas PPNS/Sekre Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Pertahun	100%	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian					100%

1. Perbandingan Realisasi dengan target

Pencapaian Indikator Persentase Masyarakat dan Aparatur yang Memahami dan Mematuhi Tentang Produk Hukum Daerah Tahun 2023 100% dari Target 100%

Pencapaian Indikator tahun 2023 Terealisasi Persentase Petugas PPNS/Sekre dalam Penyelidikan dan Penyidikan Pertahun 100% dari Target 100%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

- a. Persentase Masyarakat dan Aparatur yang memahami dan mematuhi tentang produk hukum daerah.  
Pencapaian atas realisasi persentase masyarakat dan aparaturnya yang memahami dan mematuhi tentang produk hukum daerah pada tahun 2023 dengan persentase 100%, dengan dukungan perencanaan dan kegiatan bidang teknis terkait di tahun 2023 dapat terlaksana.
- b. Persentase Petugas PPNS/Sekre dalam penyelidikan dan penyidikan pertahun  
Pencapaian atas realisasi persentase petugas PPNS/Sekre Dalam Penyelidikan dan Penyidikan pertahun pada tahun 2023, dengan dukungan aturan teknis peraturan perundang undangan, perencanaan dan kegiatan kegiatan pada bidang teknis terkait ditahun 2023 dapat terlaksana 100%.

### 3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Pada Tahun 2023 dengan menurunnya kasus pandemi COVID-19 di seluruh wilayah Indonesia, maka tidak mengurangi penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar, cenderung meningkat.

- a. Persentase Masyarakat dan Aparatur yang memahami dan mematuhi tentang produk hukum daerah
  - Upaya yang telah dilakukan : melakukan koordinasi dengan Satpol PP se Kalsel dalam melakukan Sosialisasi tentang produk Hukum daerah dan pelaksanaannya.
  - Hambatan dalam pencapaian kinerja : minimnya dukungan anggaran kegiatan penyuluhan/sosialisasi untuk memenuhi kualifikasi masyarakat dan aparatur yang memahami dan mematuhi tentang produk hukum daerah.
  - Rencana tindak lanjut : Merencanakan program dan kegiatan Penyuluhan/Sosialisasi tentang produk hukum daerah dan peningkatan penegakan perda/pergub dengan cara menjalin koordinasi yang baik dengan pusat dan Satpol PP Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan.
- b. Persentase Petugas PPNS/Sekre dalam Penyelidikan dan Penyidikan pertahun
  - Upaya yang dilakukan : secara berkala melakukan koordinasi ke pusat dan Kab/Kota mengenai penegakan Perda, melakukan evaluasi dan monitoring penegakan perda oleh Satpol PP se Kalsel.
  - Hambatan dalam pencapaian kerja : minimnya dukungan anggaran kegiatan untuk melaksanakan penegakan perda.
  - Rencana tindak lanjut : Koordinasi dengan Pusat dalam peningkatan kualitas dan kuantitas PPNS sebagai penegak perda, dan khususnya koordinasi dalam hal data penegakkan Perda atau Perkada Provinsi Kalimantan Selatan.

### 4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian Indikator Kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan program program yang dilaksanakan selama tahun 2023, yaitu :

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Sub kegiatan : Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dari target 1 dokumen pada tahun 2023 ini dapat terealisasi sebanyak 1 Dokumen, yakni telah berhasil membuat sebanyak 3 SOP, sehingga persentase capaian berjumlah 100%

-Sub kegiatan : Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada, dari target 13 Laporan pada tahun 2023 ini dapat terealisasi sebanyak 13 Laporan, sehingga persentase capaian berjumlah 100%

Kegiatan : Penegakan Peraturan daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur

-Sub kegiatan : Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, dari target 2 Laporan pada tahun 2023 ini dapat terealisasi sebanyak 2 Laporan, sehingga persentase capaian berjumlah 100%

-Sub Kegiatan : Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, dari target 4 Laporan pada tahun 2023 ini dapat terealisasi sebanyak 4 Laporan, sehingga persentase capaian berjumlah 100%

-Sub Kegiatan : Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, dari target 4 Laporan pada tahun 2023 ini dapat terealisasi sebanyak 4 Laporan, sehingga persentase capaian berjumlah 100%

Kegiatan : Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi

-Sub kegiatan : Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditepat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS, dari target 1 Dokumen pada tahun 2023 ini dapat terealisasi sebanyak 1 Dokumen, sehingga persentase capaian berjumlah 100%

2. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran

NO	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran	Meningkatkan tanggungjawab masyarakat terhadap penanganannya, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, bahaya kebakaran dan bencana	100 %	100%	100%
		Meningkat Peran Satlinmas dan Damkar	100 %	100%	100%
Rata-Rata Capaian					100%

NO	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2023		
		2021	2022	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Tingkat Tanggungjawab Aparatur Satlinmas	75%	100%	100%	100%	100%

	dan Damkar kab/kota yang Sigap dan Terampil					
2	Persentasi Satlinmas dan Damkar kab/kota yang aktif dalam penanganan Trantib, Bahaya Kebakaran dan Bencana	80%	100%	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian						100%

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Pencapaian Indikator **Tingkat Responsibilitas Aparatur Satlinmas dan Damkar kab/kota yang Sigap dan Terampil** tahun 2023 100% dari target 100%

Pencapaian Indikator **Persentasi Satlinmas dan Damkar kab/kota yang aktif dalam penanganan Trantib, Bahaya Kebakaran dan Bencana** tahun 2023 100% dari target 100%

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

- 2.1 Pencapaian atas realisasi tingkat responsibilitas aparaturnya satlinmas dan damkar kab/kota yang sigap dan terampil tahun 2023 dengan persentasi 100%, sedangkan tahun 2022 pencapaian sebesar 100% ini berarti realisasi sudah mencapai target yang ditetapkan.
- 2.2 Pencapaian atas realisasi persentasi satlinmas dan damkar kab/kota yang aktif dalam penanganan trantib, bahaya kebakaran dan bencana tahun 2022 dengan persentasi 100%, sedangkan tahun 2021 pencapaian sebesar 100% ini berarti realisasi sudah mencapai target yang ditetapkan.

3. Analisa Peningkatan dan Penurunan Kinerja.

- 3.1 Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan responsibilitas aparaturnya satlinmas dan damkar di tahun 2023 dilakukan dengan:
- Melaksanakan program dan kegiatan koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi dan monitoring di 13 Kab/Kota di Kalimantan Selatan terkait Linmas dan Damkar
  - Merumuskan program dan kegiatan pengembangan/peningkatan kapasitas aparaturnya LINMAS dan DAMKAR untuk memperoleh keterampilan dan keahlian dari berbagai pelatihan berbasis kualifikasi dan kompetensi

- Memantau kekurangan kegiatan/program untuk dievaluasi dan memberikan hasil maksimal agar meningkatnya keterampilan aparaturnya LINMAS dan DAMKAR lebih Sigap dan Terampil dalam penanganan Bahaya Kebakaran dan Bencana
- Melaksanakan pelatihan Damkar I (satu) Angkatan ketiga dengan mengundang Narasumber atau instruktur dari Kemendagri dan Provinsi DKI Jakarta guna meningkatkan kompetensi Aparatur Damkar di kabupaten/kota wilayah provinsi Kalimantan Selatan yang mana pelaksanaan berturut dalam mengasah Kompetensi personil Petugas Pemadam Kebakaran yang dimulai dari Tahun 2020 s/d 2022.
- Perlu dukungan kontinyu dalam hal penganggaran terhadap Satlinmas yang mana tahun sebelumnya Satpol PP & Damkar Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan kegiatan mendukung dalam hal Keamanan dan Keteritiban Umum

### 3.2 Hambatan dalam pencapaian kinerja

- Kurang dan perlu pengembangan jumlah Aparatur yang mempunyai kompetensi dalam hal Petugas Pemadam Kebakaran/regenerasi petugas damkar.
- Infrastruktur yang belum memadai atau kurang mendukung/perlu pembaruan terhadap peralatan Damkar sesuai standar yang diberlakukan.
- Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki baik secara kuantitas maupun kualitas
- Perlunya peningkatan/penambahan sarana dan prasarana kebakaran yang dilaksanakan oleh OPD Satpol PP & Damkar secara bertahap dalam tahun ini

### 3.3 Rencana Tindak Lanjut

- Penyusunan Anggaran pada tahun berikutnya akan direncanakan dan disusun seefektif mungkin sehingga semua kegiatan mendapatkan dana yang mencukupi sesuai dengan pagu yang diberikan.
- Merencanakan program dan kegiatan peningkatan/pengembangan Aparatur LINMAS dan DAMKAR dalam penanganan Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran.
- Melakukan Koordinasi dan Konsultasi untuk lebih meningkatkan Aparatur LINMAS dan DAMKAR.



- Memaksimalkan fungsi dan peran Aparatur LINMAS dan DAMKAR sebagai garda terdepan penanggulangan Non kebakaran.
- Peningkatan alokasi anggaran APBD/penambahan unit pemadam kebakaran yang dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2024.
- Adanya inovasi baru penyebaran informasi melalui teknologi/aplikasi yang membantu meningkatkan dalam hal pelaporan kejadian kebakaran yang memudahkan mendapat informasi data kebakaran.
- Akan melaksanakan rapat koordinasi rutin triwulan dengan kabupaten/kota se Kalimantan Selatan.

4. Analisis Program / Kegiatan Penunjang Kinerja.

- Satlinmas sebagai aparat yang kedudukannya berada di tingkat desa dan kelurahan mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam memperkuat ketahanan negara, memberikan rasa aman dan membantu ketertiban serta mengurangi resiko akibat bencana yang terjadi. Oleh karena itu perlu diperkuat dengan meningkatkan kompetensi anggota melalui kegiatan pelatihan sesuai kebutuhan di wilayahnya. Selain itu satlinmas juga membantu pelaksanaan pemilu dan pemilukada sebagai agenda rutin setiap 5 tahun.
- Terjalinnya koordinasi antara Satpol PP dan Pemadam Kebakaran daerah Kabupaten dan Kota Se Kalimantan Selatan dengan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan untuk memperkuat kerjasama dan sinergitas berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kegiatan di daerah maupun lintas Kabupaten/Kota dan antar Provinsi.
- Penambahan sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran yang berkualitas serta sesuai standar untuk memberikan pelayanan secara lebih optimal dan melindungi petugas pemadam kebakaran dalam bertugas
- Peningkatan kompetensi anggota Damkar melalui Bimtek/pelatihan dan *in house training* sesuai kualifikasi yang dibutuhkan organisasi.
- Penambahan personel anggota Damkar yang baru

3. Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas

NO	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	Meningkatkan Pemenuhan Sumber Daya Aparatur Satpol PP dan Damkar	100%	100%	100%

		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur (Pol PP dan Damkar) Prov Kalsel	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian					100 %

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2023		
		2022	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Aparatur Pol PP dan Damkar Yang Bersertifikat	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Anggota Satpol PP dan Damkar Yang Meningkatkan Klasifikasinya	100%	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian					100 %

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

1. Dalam mencapai realisasi Peningkatan Pemenuhan Sumber Daya Aparatur Satpol PP dan Damkar di Tahun 2023, yang mana target Capaian ditetapkan sebesar 100% Pada Tahun 2023, Pencapaian Sasaran Strategis Peningkatan Pemenuhan Sumber Daya Aparatur Satpol PP dan Damkar dapat Terlaksana 100%( dari Jumlah rata-rata realisasi capaian atas jumlah Aparatur Satpol PP dan Damkar Yang Mendapatkan Pelatihan Teknis dan Fungsional; Capaian jumlah Aparatur Satpol PP dan Damkar yang Mengikuti Uji Kompetensi; capaian jumlah Aparatur Satpol PP dan Damkar Kab/Kota yang difasilitasi Mengengikuti Pengembangan SDM).
2. Dalam Mencapai realisasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur ( Satpol PP, Linmas dan Damkar) Provinsi Kalimantan Selatan di Tahun 2023, Target Capaian ditetapkan sebesar 100%. Pada Tahun 2023, Pencapaian Strategis Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur( Satpol PP, Linmas dan Damkar) Provinsi Kalimantan Selatan dapat terlaksana 100% ( dari Jumlah rata-rata realisasi capaian atas jumlah Sumber Daya Aparatur Yang Lulus Kesamaptaan; dan Capaian Jumlah Sumber Daya Aparatur yang lulus uji kompetensi).

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

- a. Persentase Aparatur Pol PP dan Damkar Yang Bersertifikat  
Pencapaian atas realisasi peningkatan Pemenuhan Sumber Daya Aparatur Satpol PP dan Damkar Pada Tahun 2023 dengan Persentase 100%, Sejak Tahun 2021 capaian setiap tahun dapat terlaksana sepenuhnya 100% dengan dukungan

perencanaan dan kegiatan bidang teknis terkait. Dan dalam Tahun 2023 Satpol PP & Damkar Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan Workshop Peningkatan Kapasitas ASN Personil Satpol PP & Damkar Provinsi Kalimantan Selatan selama 6 JP.

- b. Persentase Anggota Satpol PP dan Damkar Yang Meningkatkan Klasifikasinya Pencapaian atas realisasi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Satpol PP, Linmas dan Damkar) Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 dengan persentase 100% Sejak Tahun 2021 capaian setiap Tahun dapat Terlaksana sepenuhnya 100% dengan dukungan aturan teknis Peraturan Perundang-undangan, Perencanaan dan Kegiatan-Kegiatan Bidang Teknis Terkait.

### 3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Pada Tahun 2023 telah dilaksanakan program kegiatan dengan yang direncanakan sesuai dengan DPA Tahun Anggaran 2023, disampaikan analisis sebagai berikut:

#### 1. Upaya-upaya Yang Telah Dilakukan

Upaya Yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pencapaian Sasaran Peningkatan Pemenuhan Sumber Daya Aparatur Satpol PP dan Damkar Pada tahun 2023 dan sasaran Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur ( Satpol PP, Linmas dan Damkar) Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan dengan:

- (i) Secara berkala melakukan koordinasi dengan bidang-bidang teknis selaku user dari SDM, guna memperoleh saran dan masukan atas rencana pengembangan kapasitas personil, baik itu yang telah dilaksanakan maupun direncanakan
- (ii) Melakukan evaluasi dan monitoring atas SDM yang Telah ditingkatkan Kapasitasnya
- (iii) Melakukan sinergitas program dan kegiatan dengan bidang teknis selaku user atas SDM yang telah ditingkatkan Kapasitasnya
- (iv) Merumuskan program dann kegiatan pengembangan/peningkatan kapasitas personil dengan berpedoman atas 3 poin yang telas disebutkan diatas.

#### 2. Hambatan dalam Pencapai Kinerja

1. Kurangnya jumlah personil yang berkualifikasi pendidikan minimal S1(Strata 1) Pada Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Selatan Mengingat bahwa hamper semua jenis DIKLAT yang diselenggarakan oleh Kemendagri ( Terkait Peningkatan Kapasitas Satpol PP dan Damkar) Mengharuskan Berpendidikan minimal S1;bisa diberikan perhatian khusus terhadap OPD Satpol PP & Damkar dalam usulan Formasi yang diajukan.
2. Perlunya dukungan anggaran pendidikan dan pelatihan pada Satpol PP dan Damkar Untuk Memenuhi Kualifikasi teknis Satpol PP dan Damkar sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

3. Alokasi peserta Pengembangan Kapasitas personil baik yang dilaksanakan oleh instansi Pembina ( KEMENDAGRI) maupun yang dilaksanakan di daerah sangat terbatas..Sebagai contoh tidak terakomodirnya usulan mengikuti peserta Diklat Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sejumlah 2 orang tidak dapat terealisasi

**4. Rencana Tindak Lanjut**

1. Merencanakan program dan kegiatan peningkatan/pengembangan kapasitas berdasarkan skala prioritas organisasi
2. Melakukan koordinasi dan Konsolidasi dengan OPD Terkait dalam hal Mencari dukungan atas rencana peningkatan kapasitas personil pada Satpol PP dan Damkar
3. Memaksimalkan Pemberdayaan SDM pada Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Selatan Sesuai Bidang Teknis ( Selaku Pengguna/User SDM).
4. Mengusulkan Kembali peserta Diklat Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

**4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja**

Sasaran Strategis pada bidang pengembangan Kapasitas Personil Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Selatan terkait erat dengan sasaran Strategis organisasi serta semua bidang pada Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan.

Keberhasilan Atas Pencapaian Sasaran Strategis Peningkatan Pemenuhan Sumber Daya Aparatur Satpol PP dan Damkar dan Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur ( Satpol PP, Linmas dan Damkar) Provinsi Kalimantan Selatan, Sangat Mempengaruhi atas sasaran/kinerja utama Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Selatan.

Hal ini terlihat dalam sebagian kegiatan sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kapasitas Personil melalui kegiatan DIKLAT investigasi / Intelejen dalam rangka mendukung dan memperkuat fungsi Deteksi Dini yang juga merupakan salah satu unsur kegiatan Pol PP.
- b. Peningkatan Kapasitas Personil melalui pembentukan dan pengembangan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja. Keberadaan JAFUNG POL merupakan amanah dari Peraturan Perundang-undangan. Dengan adanya JAFUNG POL PP, personil (SDM) terpilih dapat diangkat sebagai JAFUNG POL PP., untuk dapat melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan fungsi SATPOL PP, membantu melaksanakan pekerjaan Struktural dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan TRANTIBUMLINMAS di Provinsi Kalimantan Selatan.
- c. Pelantikan Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja dilaksanakan secara bertahap untuk memenuhi formasi yang tersedia pada Sat Pol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Selatan diupayakan tetap dilaksanakan.

- d. Peningkatan Kapasitas Personil melalui Pelatihan Beladiri dan Kesamaptaan Personil. Dengan dilaksanakannya kegiatan peningkatan kemampuan beladiri, seluruh personil memiliki bekal kemampuan beladiri dalam menyukkseskan tugas dilapangan. Melalui kegiatan kesamaptaan, kondisi fisik setiap personil dapat selalu terpelihara (sehat).

4. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1.	Meningkatkan Penyelesaian Permasalahan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Umum yang Berhasil Ditindak Lanjuti	100%	100%	100%
2.	Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat/Aparatur dan Lembaga/Organisasi Terhadap Peraturan Mengenai Ketertiban Umum	Persentase Masyarakat/Aparatur yang Memahami Tentang Peraturan Ketertiban Umum	100%	100%	100%

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	Tahun 2023		
		2022	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Persentase Permasalahan Trantibum Yang Berhasil Ditindak Lanjuti	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase Aparatur Yang Memahami Tentang Peraturan Trantibum	100%	100%	100%	100%

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

- 1.1. Pencapaian Indikator Persentase Permasalahan Trantibum Yang Berhasil ditindak Lanjuti Tahun 2023 adalah 84% dari Target 100%.

- 1.2. Pencapaian Indikator Persentase Aparatur Yang Memahami Tentang Peraturan Trantibum Tahun 2023 100% dari Target 100%.

## **2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi terkait**

- 2.1. Pencapaian atas realisasi permasalahan Trantibum yang berhasil ditindak lanjuti Satpol PP dan Damkar pada tahun 2023 dengan persentase 100%, sejak tahun 2021 capaian setiap tahun dapat terlaksana sepenuhnya 100% dengan dukungan perencanaan dan kegiatan bidang teknis terkait.
- 2.2. Pencapaian atas realisasi aparaturnya yang memahami tentang peraturan trantibum pada tahun 2023 dengan persentase 100%, sejak tahun 2021 capaian setiap tahun dapat terlaksana sepenuhnya 100% dengan dukungan aturan teknis Peraturan Perundang-undangan, perencanaan dan kegiatan-kegiatan pada bidang teknis terkait.

## **3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja**

### **a. Upaya yang Telah Dilakukan**

- Dalam Pencapaian Kinerja Tersebut berbagai upaya telah dilakukan diantaranya pelatihan teknis terkait kegiatan Pengamanan, Perencanaan Awal Setiap Sebelum Giat di Lapangan dan Evaluasi pada Semua Kegiatan Yang dilaksanakan agar segala Sesuatu nya bisa Sesuai Rencana Awal.
- Memaksimalkan Anggaran Yang Tersedia dengan Mengaitkan Kegiatan Yang Relavan dengan Kegiatan Yang Pokok

### **b. Hambatan dalam Pencapaian Kinerja**

- Pada setiap Pelaksanaan Kegiatan Pasti ada Kendala Teknis Baik Sebelum Pelaksanaan, dalam Pelaksanaan dan Setelah Pelaksanaan Kegiatan. Dalam Pelaksanaan Kegiatan Biasanya yang sering menjadi kendala berupa kurangnya jumlah Petugas Operasional dan terbatasnya sarana operasional lapangan yang dalam hal ini adalah kendaraan operasional untuk mobilitas anggota di Lapangan.
- Data Yang Kurang Proporsional dalam Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Sehingga Kegiatan Operasional gabungan tidak terealisasi contohnya dalam hal pengamanan VVIP (Presiden RI), yang mana didalam perencanaan dengan kekuatan baik personil anggaran yang telah disiapkan. Waktu dan kondisi mempengaruhi terhadap pelaksanaan dilapangan.

### **c. Rencana Tindak Lanjut**

- Untuk Kedepannya dalam setiap pelaksanaan kegiatan diupayakan memaksimalkan setiap sumber daya yang ada agar setiap kegiatan yang dilaksanakan dilapangan dapat berjalan dengan aman, lancar dan tertib.

- Melakukan Koordinasi internal agar porsi anggaran dalam mendukung kegiatan dapat terakomodir sehingga capaian kinerja dapat lebih meningkat.

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pada Setiap Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tersebut diatas tidak terlepas dari segala dukungan program dan kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan Baik dalam bentuk pelatihan Teksnis di Lapangan Bagi Seluruh anggor Operasional Maupun Bantuan dalam Bentuk Dukungan teksni Sarana Operasional dalam Pelaksanaan Tugas Dilapangan Bagi Anggota.

5. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

NO	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
		Pelayanan Sarana dan Prasana Administrasi Perkantoran	360 Dokumen	1777 Dokumen	493,61%
		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Satpol PP dan Damkar	5 Orang	51 Orang	1020%
		Pelayanan Administrasi Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	100%
Rata-rata Capaian					100%

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2023		
		2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian
1	Nilai Sakip Satpol PP dan Damkar	BB	A	A	A	100%
2	Persentase Dokumen Kinerja yang disusun sesuai ketentuan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
	Persentase Dokumen Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian	1886 Dokumen	654 Dokumen	360 Dokumen	1777 Dokumen	493,61 %
	Persentase Anggota Satpol PP dan Damkar yang memiliki Sertifikat Keahlian	5 Orang	54 Orang	5 Orang	51 Orang	1020%



	Persentase Penyerapan Anggaran Satpol PP dan Damkar	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%
Rata-rata Capaian						100%

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Pencapaian Indikator **Nilai Sakip Satpol PP dan Damkar** tahun 2023 adalah sampai saat ini masih belum ada, dari Target Nilai A. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat laporan kinerja ini dibuat, pelaksanaan penilaian Sakip yang dilakukan oleh Tim SAKIP Kalsel yang terdiri dari Biro Organisasi, Bappeda dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan masih belum dilakukan sehingga untuk capaian indikator ini masih menggunakan nilai tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2022 dimana capaian pada tahun yang lalu penilaian SAKIP untuk Satpol PP dan Damkar Prov. Kalsel masih tetap sama dengan tahun sebelumnya atau sesuai dengan target dengan memperoleh nilai A dan pada tahun 2022 mendapatkan nilai A, meski demikian peningkatan ini masih belum secara signifikan jika dilihat dari perolehan secara angka.

Tentunya capaian ini satu peringkat dari target nilai A yang ingin dicapai dan jika dipersentasekan maka capaiannya hanya sebesar 81,50% dengan kategori sangat baik. Adapun cara perhitungan untuk memperoleh persentase capaiannya yaitu dengan membagi urutan nilai SAKIP yang diperoleh dengan urutan penilaian SAKIP yang ditentukan yaitu (D, C, CC, B, BB, A, AA), sebagaimana diketahui posisi urutan BB berada pada urutan ke 5 dari 7 urutan penilaian SAKIP, maka didapati persentase capaiannya yakni sebesar 81,50%.

Pencapaian Indikator **Persentase Dokumen Kinerja yang disusun sesuai ketentuan** tahun 2023 Terealisasi 5 Dokumen Dari Target 5 Dokumen. Capaian indikator ini berhasil menecapai target yang ingin dicapai yaitu 100%, sehingga capaiannya adalah 100% dan dikategorikan sangat memuaskan.

Pencapaian Inidikator **Persentase Dokumen Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian** tahun 2023 Terealisasi 1777 Dokumen Dari 360 Dokumen. Capaian indikator ini berhasil dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% dimana capaian pada tahun ini berhasil sesuai yang diharapkan yaitu 493,61%, sehingga dapat dikategorikan sangat memuaskan.

Pencapaian Inidikator **Persentase Anggota Satpol PP dan Damkar yang memiliki Sertifikat Keahlian** tahun 2023 Terealisasi 51 Orang Dari Target 5 Orang. Capaian indikator ini berhasil menecapai target yang ingin dicapai yaitu 100%, sehingga capaiannya adalah 1020% dan dikategorikan sangat memuaskan.

Pencapaian Inidikator **Persentase Penyerapan Anggaran Satpol PP dan Damkar** tahun 2023 Terealisasi 1 (satu) laporan Dari Target 1 (satu) laporan.



Capaian indikator ini berhasil sebagaimana target yang ingin dicapai yaitu 100%, sehingga capaiannya adalah 100% dan dikategorikan sangat memuaskan. Pelaksanaan pencatatan aset dan dokumen keuangan dapat terlaksana dengan baik pada tahun ini, dimana seluruh laporan keuangan dan aset disusun sebagaimana jadwal yang ditentukan.

## **2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait**

### **1. Nilai Sakip Satpol PP dan Damkar**

Sebagaimana diketahui bahwa data untuk penilaian SAKIP tahun 2023 ini belum tersedia, akan tetapi bila dilihat dari tabel menunjukkan capaian perolehan nilai SAKIP sejak tahun 2021 hingga 2023, terjadi peningkatan untuk perolehan pada tahun 2021 dimana Satpol PP dan Damkar Prov. Kalsel memperoleh nilai A, namun peningkatan hanya sebatas nol koma saja. Kemudian untuk perbandingan secara regional ataupun secara nasional data perbandingan tidak dapat disajikan karena untuk indikator ini belum dapat dipastikan bahwa terjadi kesamaan indikator pada masing – masing provinsi yang ada di pulau Kalimantan hal ini juga didukung dengan dokumen resmi yang dipublikasikan melalui website Satpol PP dan Damkar ([www.satpolppdamkar.kalselprov.go.id](http://www.satpolppdamkar.kalselprov.go.id)) yang ada di regional kalimantan sehingga pada saat dokumen ini dibuat data – data tersebut.

### **2. Persentase Dokumen Kinerja yang disusun sesuai ketentuan**

Capaian Dokumen Kinerja yang disusun sesuai ketentuan pada tahun 2021 dan 2023 adalah sama yakni berada pada angka 100%. Kemudian untuk perbandingan secara regional ataupun secara nasional data perbandingan tidak dapat disajikan karena untuk indikator ini belum dapat dipastikan bahwa terjadi kesamaan indikator pada masing – masing provinsi yang ada di pulau Kalimantan hal ini juga didukung dengan dokumen resmi yang dipublikasikan melalui website Satpol PP dan Damkar ([www.satpolppdamkar.kalselprov.go.id](http://www.satpolppdamkar.kalselprov.go.id)) yang ada di regional kalimantan sehingga pada saat dokumen ini dibuat data – data tersebut.

### **3. Persentase Dokumen Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian**

Capaian indikator ini pada tahun 2021 dan 2023 adalah 100%, serta untuk tahun 2022 dan 2023 melebihi target 100%, hal ini disebabkan Pencapaian Jumlah Dokumentasi Pelayanan Surat Menyurat pada tahun 2023 yang terdiri dari 1777 Surat Keluar, SK (Surat Keterangan) dan Nota Dinas/Persetujuan.

### **4. Persentase Anggota Satpol PP dan Damkar yang memiliki Sertifikat Keahlian**

Pencapaian Indikator Jumlah ASN Yang Mengikuti Pelatihan tahun 2022 terealisasi sebanyak 51 orang dari target 5 orang , sehingga persentase capaian pada tahun 2023 sebesar 1020%. Pencapaian ini meliputi peningkatan terhadap pengelolaan keuangan, bendahara barang, arsiparis, operator aplikasi di keuangan ,bimtek

kepegawaian serta workshop peningkatan kapasitas ASN seluruh personil Satpol PP dan Damkar Prov. Kalsel.

### 5. Persentasi Penyerapan Anggaran Satpol PP dan Damkar

Capaian indikator ini pada tahun 2022 dan 2023 adalah sama yakni berada pada angka 100%. Pada tahun 2023 jumlah anggaran kegiatan belanja langsung Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan sebesar **Rp. 31.104.862.543** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 28.905.568.702** atau sebesar **92,63 %** dan realisasi fisik **99,14%**, sedangkan Untuk tahun 2022 jumlah anggaran kegiatan belanja langsung Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan sebesar **Rp. 34.012.365.655** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 32.827.298.270** atau sebesar **96,51 %** dan realisasi fisik **100%**.

## 3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

### a. Nilai Sakip Satpol PP dan Damkar

1. Upaya yang telah dilakukan dalam Peningkatan nilai SAKIP :

- ✓ Melaksanakan evaluasi secara berkala per triwulan terhadap capaian kinerja yang belum tercapai.
- ✓ Melibatkan Eselon II dalam setiap kesempatan Rapat Evaluasi baik formal maupun non formal dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi.
- ✓ Membuat SOP Penyusunan LKJ IP.
- ✓ Melakukan penyempurnaan terhadap indikator – indikator kinerja.
- ✓ Membuat laporan progres per bulan per bidang per sub terhadap capaian kinerja yang diperjanjikan melalui Perjanjian Kinerja.

2. Hambatan dalam pencapaian kinerja dalam Peningkatan nilai SAKIP :

- ✓ Kurangnya kualitas indikator kinerja khususnya pada eselon IV yang masih ditingkatkan output dan belum pada level outcome menengah (intermediate).
- ✓ Kurangnya data dalam perhitungan indikator kinerja.
- ✓ Pemahaman terhadap perumusan antara kerja dan kinerja masih belum menyeluruh.
- ✓ Keterlambatan dan kurangnya informasi yang disajikan sebagai bahan penyusunan LKj IP.
- ✓ Diharapkan partisipasi bidang teknis pada pelaksanaan rapat evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Tim SAKIP.

3. Rencana tindak lanjut dalam peningkatan nilai SAKIP :

- ✓ Melakukan penyempurnaan terhadap indikator berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan.
- ✓ Meningkatkan koordinasi kepada instansi atau Lembaga terkait untuk pengumpulan data yang tidak dimiliki

- ✓ Meningkatkan pemahaman ASN terhadap perumusan indikator kinerja dengan melibatkan Tim Sakip sebagai narasumber.
- ✓ Memberikan format yang sesuai dengan juknis penyusunan LKj IP.
- ✓ Melibatkan partisipasi bidang teknis pada kesempatan penyampaian evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Tim SAKIP Kalsel.

**b. Persentase Dokumen Kinerja yang disusun sesuai ketentuan**

Upaya yang telah dilakukan dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan :

- ✓ Melakukan inventarisasi terhadap rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) untuk selanjutnya diproses kepada bagian perlengkapan yang ada di BAKEUDA Provinsi Kalimantan Selatan.
- ✓ Melakukan proses penganggaran terhadap pengadaan barang / jasa dan pengadaan belanja modal dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan prioritas pemenuhannya.

Hambatan dalam pencapaian kinerja dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan :

- ✓ Adanya usulan sarana dan prasarana yang diusulkan oleh Bidang Teknis yang masih perlu dikoordinasikan dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).
- ✓ Beberapa pengadaan sering terkendala terhadap penjadwalan seperti pengadaan yang melalui proses seleksi (lelang).

Rencana tindak lanjut dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan :

- ✓ Memastikan finalisasi usulan RKBMD yang telah disusun oleh masing – masing bidang untuk memenuhi sarana dan prasarana yang diperlukan.
- ✓ Memastikan kesesuaian terhadap inputan penganggaran belanja modal dengan RKBMD.
- ✓ Mengikuti proses administrasi terhadap pengadaan dengan metode lelang dan segera melakukan progres ulang terhadap pelaksanaan lelang yang batal.
- ✓ Berkoordinasi secara intense dengan pihak pengadaan barang jasa di ULP Pemprov Kalsel.
- ✓ Kebutuhan barang menjadi dasar temuan oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri untuk mencapai pelayanan Trantibumlinmas dalam hal urusan wajib.

**c. Persentase Dokumen Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian**

Upaya yang telah dilakukan dalam pemenuhan ASN yang memiliki sertifikat dan pengurusan administrasi kepegawaian ASN :

- ✓ Menyusun dan menetapkan ASN yang memenuhi persyaratan mengikuti pelatihan/ diklat untuk mendapat sertifikat

- ✓ Melaksanakan SOP terhadap pengusulan berkas kepegawaian.
- ✓ Melakukan pencatatan (penjadwalan) sebagai control terhadap pengurusan administrasi kepegawaian ASN.
- ✓ Memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana komunikasi untuk mengingatkan ASN yang bersangkutan agar memproses berkas kepengurusannya.

Hambatan dalam pencapaian kinerja dalam pemenuhan ASN yang memiliki sertifikat dan pengurusan administrasi kepegawaian ASN :

- ✓ Diharapkan aktifnya ASN yang ingin mengikuti untuk mendapat sertifikat, yang mana IP ASN Satpol PP Damkar Prov. Kalsel dengan nilai 77,90 (Peringkat 6 pada urutan SKPD Pemprov Kalsel).
- ✓ Minimnya respon ASN yang bersangkutan terhadap pemberkasan kepegawaian.
- ✓ Ketidaklengkapan berkas yang disusun oleh ASN bersangkutan.

Rencana tindak lanjut dalam pemenuhan ASN yang memiliki sertifikat dan pengurusan administrasi kepegawaian ASN :

- ✓ Memberitahukan ASN yang memenuhi persyaratan diharapkan untuk mengikuti dan mendapatkan sertifikat untuk menunjang IP ASN Satpol PP Damkar Prov. Kalsel.
- ✓ Menyampaikan informasi kepada ASN yang akan segera memasuki masa pengurusan berkas kepegawaiannya.
- ✓ Menyampaikan informasi kelengkapan berkas yang harus disiapkan ASN untuk kepengurusan berkas kepegawaian.

**d. Persentase Anggota Satpol PP dan Damkar yang memiliki Sertifikat Keahlian**

Upaya yang telah dilakukan dalam pemenuhan peserta pelatihan/ bimtek yang paham :

- ✓ Menyeleksi peserta bimtek sesuai dengan pendidikan dan keahlian
- ✓ Menetapkan peserta yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pelatihan/ bimtek

Hambatan dalam pencapaian kinerja dalam pemenuhan peserta pelatihan/ bimtek yang paham :

- ✓ Terbatasnya peserta yang memenuhi persyaratan
- ✓ Peserta atau personil untuk berminat mengikuti pelatihan/ bimtek

Rencana tindak lanjut dalam pemenuhan peserta pelatihan/ bimtek yang paham ;

- ✓ Menyampaikan informasi kepada peserta untuk mengikuti pelatihan/ bimtek
- ✓ Menyampaikan informasi kelengkapan berkas yang harus disiapkan peserta untuk mengikuti pelatihan/ bimtek.

#### **e. Persentasi Penyerapan Anggaran Satpol PP dan Damkar**

Upaya yang telah dilakukan dalam pencatatan terhadap aset dan dokumen keuangan ;

- ✓ Melakukan pencatatan terhadap aset dan dokumen keuangan
- ✓ Melaksanakan SOP terhadap pertanggungjawaban keuangan.
- ✓ Melaksanakan SOP terhadap inventarisir aset.

Hambatan dalam pencapaian kinerja dalam Pencatatan terhadap aset dan dokumen keuangan :

- ✓ Adanya reklas terhadap beberapa belanja barang dan jasa menjadi belanja modal.
- ✓ Keterlambatan dalam penyelesaian laporan kegiatan oleh PPTK sebagai bahan pemberkasan dokumen keuangan.

Rencana tindak lanjut dalam pemenuhan pencatatan terhadap aset dan dokumen keuangan :

- ✓ Memastikan kode rekening belanja terhadap pengadaan sudah sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa ataupun belanja modal.
- ✓ Memastikan PPTK agar segera mengumpulkan laporan kegiatannya sebelum melakukan proses pencairan.

#### **4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja**

Pencapaian Indikator Kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2023, yaitu :

##### **I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**

**Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:**

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan:
  1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
  2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
  2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
  2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
  3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
  4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
  5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

- 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
  - 2. Pengadaan Mebel.
  - 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
  - 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
  - 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

3. Capaian Kinerja Eselon IV

1. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat dan Aparatur Terhadap Produk Hukum Daerah	Sosialisasi produk hukum terkait sanksi administrasi dan pidana	2 Produk Hukum 100 Orang	2 Produk Hukum 100 Orang	100%
		Pembinaan sekretariat PPNS	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	100%
Rata-rata Capaian					100%

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2022		
		2021	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah Produk Hukum Yang Disosialisasikan	2 Produk Hukum	2 Produk Hukum	2 Produk Hukum	100 %
2	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Sosialisasi tentang Produk Hukum Daerah	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 %
3	Jumlah PPNS yang dibina	6 Laporan	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	100 %
Rata-rata Capaian					100%

## **1. Perbandingan Realisasi dengan target**

Pencapaian Indikator Jumlah Produk Hukum Yang Disosialisasikan Tahun 2023 terealisasi sebanyak 2 Produk Hukum dari target 2 Produk Hukum, sehingga persentase capaian pada tahun 2023 sebesar 100%.

Pencapaian Indikator Jumlah Aparatur Mengikuti Sosialisasi Tentang Produk Hukum Daerah tahun 2023 terealisasi sebanyak 100 orang dari target 100 orang, sehingga persentase capaian pada tahun 2022 sebesar 100%.

Pencapaian Indikator Jumlah PPNS yang dibina tahun 2023 terealisasi sebanyak 13 Kab/Kota dari target 13 Kab/Kota, sehingga persentase capaian pada tahun 2023 sebesar 100%.

## **2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait**

### **a. Jumlah Produk Hukum Yang Disosialisasikan**

Pencapaian realisasi kinerja serta capaian kinerja Jumlah Produk Hukum yang disosialisasikan pada tahun 2023 terealisasi sebanyak 2 (dua) Produk Hukum dari target sebanyak 2 (dua) Produk Hukum, sehingga capaian persentasenya sebesar 100%. Sedangkan pada tahun 2022 pencapaian realisasi kinerja serta capaian kinerja jumlah produk hukum yang disosialisasikan terealisasi sebanyak 2 (dua) Produk Hukum dari target sebanyak 2 (dua) Produk Hukum, sehingga capaian persentasenya 100%.

Adapun Produk Hukum yang disosialisasikan yaitu,

- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Keamanan Pangan.
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pengamanan Aset Milik Pemerintah Daerah

### **b. Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Produk Hukum Daerah**

Pencapaian realisasi kinerja serta capaian kinerja Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Produk Hukum Daerah pada tahun 2023 terealisasi sebanyak 100 orang dari target sebanyak 100 orang, sehingga capaian persentasenya sebesar 100%. Sedangkan pada tahun 2021 pencapaian realisasi kinerja serta capaian kinerja Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Produk Hukum Daerah terealisasi sebanyak 100 orang dari target sebanyak 100 orang, sehingga capaian persentasenya 100%.

### **c. Jumlah PPNS yang dibina**

Pencapaian realisasi kinerja serta capaian kinerja Jumlah PPNS yang dibina pada tahun 2023 terealisasi sebanyak 13 Kab/Kota Laporan dari target sebanyak 13 Kab/Kota, sehingga capaian persentasenya sebesar 100%. Sedangkan pada tahun 2023 pencapaian realisasi kinerja serta capaian



kinerja Jumlah Laporan Korwasdalev Pol PP dan Damkar terealisasi sebanyak 6 Laporan dari target sebanyak 6 Laporan, sehingga capaian persentasenya 100%.

### **3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja**

Berdasarkan analisis terhadap pencapaian di tahun 2023, capaian kinerja pada Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan tidak mengalami penurunan kinerja.

#### **a. Upaya yang telah dilakukan**

- Secara selektif melakukan pendataan terhadap aturan-aturan produk hukum daerah, baik berupa peraturan daerah, peraturan gubernur dan keputusan gubernur, khususnya yang bermuatan sanksi-sanksi.
- Melakukan evaluasi dan monitoring produk-produk hukum yang telah disosialisasikan terhadap implementasinya secara berkelanjutan.
- Mengubah pola pemanggilan aparaturnya yang akan menerima sosialisasi menjadi pola sistem jemput bola di tempat yang sudah ditentukan untuk diberikan sosialisasi agar tujuan meningkatnya pemahaman aparaturnya menjadi tepat sasaran efektif dan efisien.

#### **b. Hambatan dalam pencapaian kinerja**

- Minimnya jumlah sumberdata aparaturnya sehingga tidak sebanding dengan analisis beban kerja yang ada pada kasi binwasluh
- Minimnya dukungan anggaran karena terjadinya pemangkasan anggaran atau refocusing anggaran.

#### **c. Rencana tindak lanjut**

- Tetap melakukan investarisasi produk hukum daerah baik berupa peraturan daerah, peraturan gubernur, maupun keputusan gubernur secara berkelanjutan.
- Lebih giat melakukan koordinasi dan sharing dengan Pol PP Kab/kota terkait monitoring terhadap informasi data-data pelanggaran produk hukum daerah di wilayah kalimantan selatan
- Memaksimalkan peran dan fungsi sumber daya aparaturnya yang dimiliki.

### **4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja**

Adapun Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja adalah sbb:

- 1) Adanya komitmen dan konsistensi pimpinan terhadap program atau kegiatan yang telah disusun agar bisa terselenggara secara keseluruhan
- 2) Melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan untuk memastikan efisiensi dan efektifitas program/kegiatan serta penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja.



2. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatkan Peran Petugas Penegak Produk Hukum dalam Penyelidikan dan Penyidikan	Penyelenggaraan Penegakan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Gubernur	2 Produk Hukum	2 Produk Hukum	100%
		Fasilitasi permasalahan terhadap pelanggaran produk hukum	100 Orang	100 Orang	100%
Rata-rata Capaian					100%

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2022		
		2021	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah Produk Hukum Daerah dan Peraturan Gubernur yang Ditegakkan	6 Produk Hukum	2 Produk Hukum	2 Produk Hukum	100%
2	Jumlah Permasalahan/Pelanggaran Produk Hukum Daerah dan Peraturan Gubernur yang Difasilitasi/Mediasi	200 Orang	100 Orang	100 Orang	100%
Rata-rata Capaian					100%

1. Perbandingan Realisasi dengan target

Pencapaian Indikator Jumlah Produk Hukum Yang Ditegakan Tahun 2023 terealisasi sebanyak 2 Produk Hukum dari target 2 Produk Hukum, sehingga persentase capaian pada tahun 2023 sebesar 100%.

Pencapaian Indikator Jumlah Permasalahan Pelanggaran Yang Difasilitasi/Mediasi tahun 2023 terealisasi sebanyak 100 Pelanggaran dari target sebanyak 100 Pelanggaran, sehingga persentase capaian pada tahun 2023 sebesar 100%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

**a. Jumlah Produk Hukum Yang Ditegakan**

Pencapaian realisasi kinerja serta capaian kinerja Jumlah Produk Hukum Yang Ditegakan pada tahun 2023 terealisasi sebanyak 2 Produk Hukum dari target sebanyak 2 Produk Hukum, sehingga capaian persentasenya sebesar 100%. Adapun produk hukum yang ditegakkan antara lain

- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraab Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.

**b. Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Produk Hukum Daerah**

Pencapaian realisasi kinerja serta capaian kinerja Jumlah Permasalahan Pelanggaran Yang Difasilitasi/Mediasi pada tahun 2023 terealisasi sebanyak 200 Pelanggaran dari target sebanyak 200 Pelanggaran, sehingga capaian persentasenya sebesar 100%. Sedangkan pada tahun 2023 pencapaian realisasi kinerja serta capaian kinerja Jumlah Permasalahan Pelanggaran Yang Difasilitasi/Mediasi terealisasi sebanyak 100 Orang dari target sebanyak 100 Orang, sehingga capaian persentasenya 100%.

**3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja**

- a. Upaya yang telah dilakukan dengan melaksanakan kegiatan sesuai target dan dokumen anggaran tahun 2023 yang telah disusun berdasarkan kebutuhan dan target kinerja. Jumlah target penegakan perda sebanyak 2 Produk Hukum, dapat terealisasi 2 Produk Hukum. Sedangkan permasalahan yang dapat difasilitasi sebanyak 100 Orang dapat dicapai sesuai target 100 Orang. Penurunan capaian kinerja ini menggambarkan semakin berkurangnya pelanggaran terhadap Produk Hukum Daerah dan dapat disimpulkan bahwa semakin berkurang Orang/Masyarakat yang melanggar hukum dan semakin meningkatnya kesadaran Hukum bagi masyarakat.
- b. Hambatan dalam pencapaian kinerja, ada beberapa faktor yang jadi kendala dalam melaksanakan tugas yaitu, Perubahan situasi dan kondisi yang signifikan yang mana Program kita harus menyesuaikan kondisi pandemi yang saat ini masih berlangsung masih patuh terhadap Prokes dalam melaksanakan kegiatan
- c. Rencana tindak lanjut, akan melaksanakan penyesuaian dalam kegiatan yang berlaku saat ini yaitu saat Pandemi terhadap prokes.

**4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja**

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

1. Kepala SKPD sebagai pengarah dalam melaksanakan program kegiatan sekaligus penentu kebijakan dan eksekutor.

- 2. Kepala Bidang PPHD sebagai pembimbing atau koordinator untuk melaksanakan kegiatan yang ada pada seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- 3. Perlunya Koordinasi Satpol PP & Damkar Provinsi Kalimantan Selatan terhadap kab/kota dalam hal sesuai tufoksi khususnya dalam hal Penegakkan Perda dan Perkada (data penegakkan).

3. Kepala Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat

NO	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatkan Peran dan Fungsi Satlinmas	Pembinaan Pada Sumber Daya Aparatur Satlinmas	100%	100%	100%
		Pelatihan Anggota Satlinmas di Kab/Kota	150 Orang	150 Orang	100%
Rata-rata Capaian					100%

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2023		
		2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase SDM Yang Terampil dalam Dalam Penanganan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Bencana dan Sosial	50 org	100 %	100%	100%	100%
2	Jumlah Anggota Satlinmas yang telah melaksanakan Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi	50 org	75 org	150 Orang	150 Orang	100%
Rata-rata Capaian						100%

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Pencapaian Indikator Persentase SDM Yang Terampil dalam Dalam Penanganan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Bencana dan Sosial Tahun 2023 terealisasi sebanyak 100% dari target 100% sehingga persentase capaian pada tahun 2023 sebesar 100%.

Pencapaian Indikator Jumlah Anggota Satlinmas yang telah melaksanakan Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Tahun 2023 terealisasi

sebanyak 150 Orang (terbagi atas 30 orang/kabupaten yang dilaksanakan di 5 (lima) Kabupaten) dari Target 150 Orang sehingga persentase capaian pada tahun 2023 sebesar 100%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

- a. Persentase SDM Yang Terampil dalam Dalam Penanganan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Bencana dan Sosial.

Pada Tahun 2023 Persentase SDM Yang Terampil dalam Dalam Penanganan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Bencana dan Sosial mempunyai target sebesar 100% dengan Capain 100% dan Realisasi 100% sama dengan tahun 2022.

- b. Jumlah Anggota Satlinmas yang telah melaksanakan Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi

Pada Tahun 2022 kegiatan yang dilaksanakan, Jumlah Aparatur yang memiliki pengetahuan atas daerah rawan bencana dan masalah sosial mempunyai target sebanyak 75 orang dibandingkan tahun 2023 dengan kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi sebanyak 150 orang, yang berarti ada peningkatan dengan capaian realisasi 100%.

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

- a. Upaya yang telah dilakukan Seksi Linmas di tengah konsidi Kesiapsiagaan menghadapi Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024.

- Melaksanakan program dan Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Aparatur LINMAS 13 Kab/Kota di Kalsel, dengan data anggota Satlinmas di kab/kota pada tahun 2023, sebagai berikut :

No	Kab/kota	Indikator	Variabel	Satuan	Tahun
					2023
1	Banjarmasin	Anggota Satlinmas	Jumlah Anggota Satlinmas	Jumlah	292
2	Banjarbaru	Anggota Satlinmas	Jumlah Anggota Satlinmas	Jumlah	100
3	Banjar	Anggota Satlinmas	Jumlah Anggota Satlinmas	Jumlah	2969
4	Barito Kuala	Anggota Satlinmas	Jumlah Anggota Satlinmas	Jumlah	2010
5	Tanah Laut	Anggota Satlinmas	Jumlah Anggota Satlinmas	Jumlah	130

6	Tanah Bumbu	Anggota Satlinmas	Jumlah Anggota Satlinmas	Jumlah	3938
7	Kotabaru	Anggota Satlinmas	Jumlah Anggota Satlinmas	Jumlah	1026
8	Tapin	Anggota Satlinmas	Jumlah Anggota Satlinmas	Jumlah	2570
9	HSS	Anggota Satlinmas	Jumlah Anggota Satlinmas	Jumlah	648
10	HST	Anggota Satlinmas	Jumlah Anggota Satlinmas	Jumlah	1796
11	HSU	Anggota Satlinmas	Jumlah Anggota Satlinmas	Jumlah	960
12	Balangan	Anggota Satlinmas	Jumlah Anggota Satlinmas	Jumlah	2338
13	Tanjung	Anggota Satlinmas	Jumlah Anggota Satlinmas	Jumlah	1440

Rekap Data Keanggotaan Satlinmas Kab/Kota 2023\*

- Melaksanakan giat donor darah Satpol PP dan Damkar serta bersama seluruh SKPD di lingkup Provinsi Kalimantan Selatan bekerja sama dengan PMI Untuk Memenuhi stok kantong darah di Kalimantan Selatan.
- Melaksanakan pelatihan untuk Satlinmas di kabupaten/kota, Adapun pelatihan tersebut para anggota diberikan materi dan praktek terkait kebencanaan kebakaran, dan praktek pertolongan pertama dari PMI serta praktek kedisiplinan/PBB dari anggota Koramil/Kodim.
- Melaksanakan Bimbingan Teknis Aparatur Linmas se Kalimantan Selatan dalam Rangka persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan dilaksanakan Serentak pada Tahun 2024.

b. Hambatan dalam pencapaian kinerja

- Perlu adanya sosialisasi terkait penggunaan aplikasi SIM Linmas, Dimana di aplikasi tersebut sudah disediakan untuk laporan anggota satlinmas, serta bisa melaporkan kejadian dan upaya penanggulangan yang terjadi di masing-masing daerah.
- Perlu dukungan kontinyu dalam hal penganggaran terhadap Satlinmas yang mana tahun sebelumnya Satpol PP & Damkar Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan kegiatan mendukung dalam hal Keamanan dan Keteritiban Umum, dalam hal ini melaksanakan Lomba Pos Kamling se Kal. Sel.

- Adanya keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan point di atas tidak dapat dilaksanakan, yang seharusnya bisa dilaksanakan dikarenakan Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan linear terhadap kegiatan yang ada di OPD Satpol PP & Damkar Prov Kalsel.
- Keterbatasan Sumber Daya. Terkadang, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan program Linmas. Ini dapat mempengaruhi pelatihan dan pemeliharaan personel Linmas.
- Ketidakhahaman Masyarakat, Jika masyarakat tidak sepenuhnya memahami tujuan dan manfaat Linmas, hal ini dapat menjadi hambatan. Edukasi dan sosialisasi yang kurang memadai dapat menyulitkan penerimaan dan partisipasi masyarakat.
- Koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan kelompok satlinmas perlu berjalan dengan baik. Jika ada masalah koordinasi atau komunikasi yang buruk, hal ini dapat menghambat efektivitas Linmas.
- Ketidaksetaraan Antar Wilayah. ada perbedaan kondisi antar wilayah di suatu provinsi. Wilayah yang lebih terpencil atau terisolasi mungkin menghadapi hambatan yang lebih besar dalam melaksanakan kegiatan Linmas.
- Konflik Internal atau Eksternal, Adanya konflik internal di masyarakat atau konflik eksternal dengan kelompok atau komunitas tertentu dapat menghambat pelaksanaan kegiatan Linmas.
- Tingkat Partisipasi yang Rendah, Jika tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan Linmas rendah, hal ini dapat mengurangi efektivitasnya. Faktor-faktor seperti ketidakpercayaan atau kurangnya minat masyarakat dapat menjadi hambatan.
- Faktor Alam dan Lingkungan, Faktor-faktor alam seperti bencana alam atau kondisi lingkungan yang sulit dapat menjadi hambatan bagi kegiatan Linmas.
- Perubahan kondisi setelah tahun 2022 dapat mempengaruhi dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh Linmas dan Satlinmas di Kalimantan Selatan.

#### **4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja**

- Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Sangat Strategis dalam Upaya Menumbuh kembangkan Kepatuhan Masyarakat terhadap peraturan daerah dan keputusan Kepala Daerah Yang Sangat Berdampak Signifikan Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebagai Penunjang Suksesnya Pelaksanaan otonomi Daerah.
- Terjalinnya Koordinasi antara Satpol PP Darah Kabupaten dan Kota Se Kalimantan Selatan dengan Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Selatan Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan.

- Peningkatan Sumber Daya, Peningkatan alokasi anggaran dan sumber daya manusia dapat menjadi faktor penunjang utama. Dengan dukungan finansial yang memadai, Linmas dan Satlinmas dapat melaksanakan pelatihan, peralatan, dan kegiatan operasional dengan lebih efektif.
- Partisipasi Masyarakat yang Tinggi, Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam program Linmas dapat meningkatkan efektivitasnya. Edukasi masyarakat tentang peran Linmas dan satlinmas dan manfaatnya dapat membantu menciptakan pemahaman dan dukungan yang lebih baik.
- Pelatihan yang Berkualitas, Penyediaan pelatihan yang baik untuk aparatur linmas dan satlinmas dapat meningkatkan keterampilan mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pelatihan tersebut dapat mencakup pengetahuan tentang keamanan, penanganan bencana, dan keterampilan komunikasi.
- Koordinasi yang Efektif, Kerjasama yang baik antara Satpol PP dan Damkar Prov. Kalsel, Linmas, Satlinmas, dan berbagai pihak terkait lainnya seperti pemerintah daerah, kepolisian, dan instansi terkait lainnya sangat penting. Koordinasi yang efektif dapat memastikan sinergi dalam pelaksanaan kegiatan Linmas.
- Teknologi dan Inovasi, Pemanfaatan teknologi dan inovasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan Linmas. Misalnya, pemanfaatan aplikasi atau sistem informasi untuk memudahkan pelaporan dan koordinasi (SIM Linmas).
- Peran Pemerintah Daerah, Dukungan kuat dari pemerintah daerah, termasuk kebijakan yang mendukung dan pengawasan yang efektif, dapat menjadi faktor penunjang kinerja Linmas Satpol PP dan Damkar Prov. Kalimantan Selatan.
- Ketahanan Terhadap Bencana, Mengingat Kalimantan Selatan dapat menghadapi risiko bencana alam seperti banjir atau kebakaran hutan, upaya dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap bencana melalui peran Linmas dan Satlinmas dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi.

4. Kepala Seksi Pemadam Kebakaran

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala Seksi Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Meningkatkan Responsibilitas Terhadap Penanganan Ketertiban Umum dan Trans Masyarakat, Bahaya Kebakaran dan Bencana	Pembinaan Pada Sumber Daya Aparatur Pemadam Kebakaran	8 orang	8 orang	100 %
		Fasilitasi Penanganan Bahaya Kebakaran dan Dampak Kebakaran	100 %	100 %	100 %
		Monitoring Wilayah Rawan Kebakaran dan Dampak Kebakaran Yang Dimonitor	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	100 %
Rata-Rata Capaian					100 %

Perbandingan kinerja tersebut dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2023		
		2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Terampil	8 orang	8 orang	8 orang	8 orang	100 %
2	Presentase Kejadian Kebakaran dan Dampak Kebakaran yang Ditangani	43 kejadian	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Jumlah Kab/Kota yang Tanggap Penanganan Bahaya Kebakaran	13 kab/kota	13 kab/kota	13 kab/kota	13 kab/kota	100 %
Rata-Rata Capaian						100 %



Rumus Perhitungan :

1. Pembinaan pada Sumber Daya Aparatur Pemadam Kebakaran
$= \frac{\text{Jumlah Aparatur Damkar yang terampil}}{\text{Jumlah target Aparatur Damkar yang terampil}} \times 100 \%$
2. Fasilitasi Penanganan Bahaya Kebakaran dan dampak kebakaran
$= \frac{\text{Jumlah laporan kejadian kebakaran dan dampak kebakaran yang ditangani/diterima}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran dan dampak kebakaran yang ditangani}} \times 100 \%$
3. Monitoring Wilayah Rawan Kebakaran dan Dampak Kebakaran yang Dimonitor
$= \frac{\text{Jumlah Kab/Kota yang Tanggap Penanganan Bahaya kebakaran}}{\text{Jumlah Target Kab/Kota yang Tanggap Penanganan Bahaya kebakaran}} \times 100 \%$

Penjelasan mengenai isi tabel di atas adalah sebagai berikut :

1) **Perbandingan Realisasi dengan Target;**

Target untuk Indikator jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang terampil pada Tahun 2023 adalah 8 orang, pencapaian indikator kinerja yang terealisasi sebanyak 8 orang dari target yang sudah ditetapkan, sehingga presentasi capaian pada tahun 2023 sebesar 100 %.

Rumus perhitungan jumlah aparaturnya pemadam yang terampil adalah sebagai berikut :

$\% \text{ jumlah aparaturnya damkar yg terampil} = \frac{\Sigma \text{ aparaturnya yang mengikuti pelatihan/diklat}}{\Sigma \text{ target aparaturnya damkar yang terampil}} \times 100\%$
$\% \text{ jumlah aparaturnya damkar yg terampil} = \frac{\Sigma 8 \text{ orang}}{\Sigma 8 \text{ orang}} \times 100\% = \mathbf{100 \%}$

Target untuk Indikator Presentase Kejadian Kebakaran dan Dampak Kebakaran yang Ditangani pada Tahun 2023 adalah 100 %, pencapaian indikator kinerja yang terealisasi sebesar 100 % dari target yang sudah ditetapkan, sehingga presentasi capaian pada tahun 2023 sebesar 100 %.

Rumus perhitungan Presentase Kejadian Kebakaran dan Dampak Kebakaran yang Ditangani adalah sebagai berikut :

$\% \text{ kejadian kebakaran yang ditangani} = \frac{\Sigma \text{ jumlah kejadian yang dilaporkan}}{\Sigma \text{ jumlah kejadian yang ditangani}} \times 100\%$
$\% \text{ kejadian kebakaran yang ditangani} = \frac{\Sigma 149 \text{ kejadian}}{\Sigma 149 \text{ kejadian}} \times 100\% = \mathbf{100 \%}$

Data kejadian yang ditangani oleh Seksi Pemadam Kebakaran sampai bulan november sebanyak 149 kejadian yang terdiri dari kejadian kebakaran (pemukiman, bangunan, dan hutan lahan) serta laporan kejadian penyelamatan (manusia, hewan, dan penyelamatan lainnya). adapun rincian kejadian yang ditangani dari januari-desember dapat dilihat di tabel dibawah ini.

**REKAP KEJADIAN YANG DITANGANI DAMKAR PROV. KALSEL**

NO	JENIS KEJADIAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
	KEBAKARAN													
1	KEBAKARAN PEMUKIMAN	6	2	2	1	3	3	5	7	6	4	2		41
2	KEBAKARAN BANGUNAN			1	1			2		1		1		6
3	KEBAKARAN HUTAN & LAHAN								27	35	17	3		82
4	KEBAKARAN LAINNYA													0
	PENYELAMATAN													
1	PENYELAMATAN MANUSIA		1								2			3
2	PENYELAMATAN HEWAN			1			1			3	4	3		12
3	PENYELAMATAN LAINNYA					3					1	1		5
	JUMLAH KEJADIAN PERBULAN	6	3	4	2	6	4	7	34	45	28	10		149

Adapun data kejadian kebakaran pemukiman dan penyelamatan yang ditangani oleh Seksi Pemadam Kebakan dalam kurun waktu 3 bulan terakhir (september-desember) dapat dilihat dalam tabel data dibawah ini.

DATA KEJADIAN KEBAKARAN PEMUKIMAN DAN PENYELAMATAN DITANGANI DAMKAR PROV. KALSEL

NO	HARI/TANGGAL	LOKASI / ALAMAT KEJADIAN	KOTA	JENIS	OBJEK KEJADIAN	REGU
BULAN SEPTEMBER						
1	Rabu, 6/9/2023 19.45	Jl. Cempaka Raya, Kel. Telaga Biru Kec. Banjar-Barat Kota Banjarmasin	Banjarmasin	Kebakaran Pemukiman	Mess Pekerja terbakar 40%	Regu 3 Bjm
2	Rabu, 6/9/2023 21.15	Jl. Perambaian Kel. Sungai Ulin Banjarbaru Utara Komp. Griya Mandiri Utama Banjarbaru	Banjarbaru	Penyelamatan Hewan	Kucing tercebur dalam sumur	Regu 2 Bjb
3	Sabtu, 9/9/2023 11.35	Jl. A. Yani Km. 19.200 RT. 11 RW. 08 Kec. Lianggang Kota Banjarbaru	Banjarbaru	Kebakaran Gudang	Gudang Solar, 1 Mobil & 2 Sepeda Motor	Regu 2 Bjb
4	Rabu, 13/9/2023 19.30	Jl. Skip Lama RT. 38 RW. 03 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjar-Tengah Kota Banjarmasin	Banjarmasin	Kebakaran Pemukiman	Membakar 2 buah Rumah	Regu 3 Bjm
5	Sabtu, 16/9/2023 08.08	Jl. Aneka Tambang Cempaka Kota banjarbaru	Banjarbaru	Penyelamatan Manusia	Korban Laka Lantas	Regu 3 Bjb
6	Minggu, 17/9/2023 10.50	Jl. Taman Sari Depan Mahligai Pancasila Kec. Banjar-Tengah Kota Banjarmasin	Banjarmasin	Penyelamatan Manusia	Korban Laka Lantas	Regu 2 Bjm
7	Senin, 18/9/2023	Jl. Suprpto Pos Damkar Prov. Kel. Antasan besar Kec. Banjar-Tengah Kota Banjarmasin	Banjarmasin	Penyelamatan Manusia	Cincin tidak bisa lepas dijari	Regu 2 Bjm
8	Selasa, 19/9/2023	Jl. Sulawesi Pasar Lama Banjar-Tengah Kota Banjarmasin	Banjarmasin	Penyelamatan Hewan	Monyet peliharaan tersangkut dibiho	Regu 3 Bjm
9	Jum'at, 22/9/2023	Belakang Mesjid Jami Gg. Syukuri & Gg. Damai RT. 04 & 06 RW. 01 Kota Banjarmasin	Banjarmasin	Kebakaran Pemukiman	Membakar 18 buah rumah	Regu 2 Bjm
10	Minggu, 24/9/2023 5.49	Jl. Belitung Darat Gg. BKIA Kec. Banjar-Barat Kota Banjarmasin	Banjarmasin	Kebakaran Pemukiman	Membakar 4 rumah & 1 Sepeda motor	Regu 1 Bjm
11	Selasa, 26/9/2023 04.25	Jl. Sutoyo S. Komp. Es Terang Rt. 20 Rw. 02 Kec. Banjar-Tengah Kota Banjarmasin	Banjarmasin	Kebakaran Pemukiman	Membakar 1 Bangunan kontrakan 2 pintu	Regu 3 Bjm
12	Kamis, 28/9/2023 16.10	Jl. Letjend Soeprato Gedung Astakona Kec. Banjar-Tengah Kota Banjarmasin	Banjarmasin	Penyelamatan Hewan	Biawak liar masuk kedalam gedung	Regu 3 Bjm
13	Kamis, 28/9/2023 22.35	Gg. Sepakat telaga Biru Kec. Banjar-Barat Kota Banjarmasin	Banjarmasin	Kebakaran Pemukiman	Membakar 2 buah Rumah	Regu 3 Bjm
BULAN OKTOBER						
14	Sabtu, 07/10/2023 13.20	Jl. Komp. Perkantoran Pemprov. Kalsel Kota Banjarbaru	Banjarbaru	Penyelamatan Manusia	Korban Laka Lantas	Regu 3 Bjb
15	Minggu, 8/10/2023 7.45	Komp. Citra Persada Asri Jl. Lestari 3 Sungai Besar Kota Banjarbaru	Banjarbaru	Penyelamatan Hewan	Evakuasi Ular Piton	Regu 3 Bjb
16	Minggu, 8/10/2023 16.40	Jl. Taman Sari Depan Kediaman Wagub Kec. Banjar-Tengah Kota Banjarmasin	Banjarmasin	Penyelamatan Manusia	Korban Laka Lantas	Regu 1 Bjm
17	Selasa, 10/10/2023 01.31	Jl. Jafri zam-zam Gg. Karya Rt.50 Rw. 04 Kec. Banjar-Tengah Kota Banjarmasin	Banjarmasin	Kebakaran Pemukiman	Membakar 3 buah rumah dan 1 gudang kerupuk	Regu 2 Bjm
18	Rabu, 11/10/2023 19.39	Jl. Rahayu Sekolah IT Qardhan Hasanah Kel. Rahayu Kota Banjarbaru	Banjarbaru	Penyelamatan Hewan	Evakuasi Sarah Lebah	Regu 1 Bjb
19	Jum'at, 13/10/2023 03.45	Jl. Kampung Melayu Darat Gg. Istiqomah Rt. 10 & Rt. 06 Rw. 01 Bajarmasin	Banjarmasin	Kebakaran Pemukiman	Membakar 9 buah rumah	Regu 2 Bjm
20	Sabtu, 14/10/2023 08.09	Jl. Karang Anyar 2 SD Islam Ma'rifah Ashifa Kota Banjarbaru	Banjarbaru	Evakuasi Pohon Tumbang	1 Buah Pohon Tumbang	Regu 1&3 Bjb
21	Minggu, 15/10/2023 13.50	Jl. MT Haryono RT.04 Rw. 01 Kec. Banjar-Tengah Kota Banjarmasin	Banjarmasin	Kebakaran Pemukiman	Membakar Bangunan PT. Jamkrida	Regu 2 Bjm
22	Senin. 16/10/2023 17.00	Jl. Belitung Darat Gg. Family Kec. Banjar-Barat Kota Banjarmasin	Banjarmasin	Kebakaran Pemukiman	Membakar 2 buah Rumah	Regu 3 Bjm
23	Selasa, 24/10/2023 22.27	Jl. Bumi Berkat 8 Cempaka Banjarbaru	Banjarbaru	Penyelamatan Hewan	Evakuasi Ular Piton	Regu 2 Bjb
24	Minggu, 29/10/2023 20.53	Komplek Banua permai 2 banjarbaru	Banjarbaru	Penyelamatan Hewan	Evakuasi Ular Kobra Hitam	Regu 1 Bjb
BULAN NOVEMBER						
25	Sabtu, 4/11/2023 18.00	Jl. Wengga Abadi 3 Komp. Agis Residence	Banjarbaru	Penyelamatan Hewan	Evakuasi Sarang Tawon Vespa	Regu 1 Bjb
26	Senin, 6/11/2023 20.30	Jl. Taman Sari Pos Bjm Damkar Prov. Kalsel	Banjarmasin	Penyelamatan Manusia	Pelepasan Cincin	Regu 3 Bjm
27	Sabtu, 11/11/2023 13.46	Jl. Kuripan Gg.1 Rt. 01 Rw.02 Kel. Kebun Bunga Kec. Banjar Timur Banjarmasin	Banjarmasin	Kebakaran Pemukiman	Membakar 4 Rumah	Regu 2 Bjm
28	Kamis, 16/11/2023 9.27	Jl. Anang Adenansi Rt.01 Rw.01 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjar Tengah	Banjarmasin	Kebakaran Pemukiman	Membakar 1 buah Rumah	Regu 1 Bjm
29	Minggu, 19/11/2023 12.05	Jl. Taman Sari Pos. Damkar Prov. Kec. Banjar-Tengah Kota Banjarmasin	Banjarmasin	Penyelamatan Hewan	Kucing Terjebak dikolong Mobil	Regu 1 Bjm
30	Selasa, 21/11/2023 09.35	Komp. Kelapa Gading Asri Kel. Sungai Besar No. 19 Rt.03 Rw.01 Banjarbaru	Banjarbaru	Evakuasi Pohon Tumbang	1 Buah Pohon Tumbang	Regu 3 Bjb
31	Sabtu, 25/11/2023 16.50	Jl. Sukaramai Pasar Taibah Martapura Kab. Banjar	Kab. Banjar	Kebakaran Pasar	Membakar 26 buah Toko	Regu 1 Bjb
32	Rabu, 28/11/2023 10.44	Banjarbaru Utara	Banjarbaru	Penyelamatan Hewan	Evakuasi Ular Kobra Hitam	Regu 2 Bjb
BULAN DESEMBER						
33	Minggu, 3/12/2023 21.00	Jl. Tambak Langsung Komp. Villa Mahatama Kel. Syamsuddin Noor Kec. Landaan Ulin	Banjarbaru	Evakuasi Pohon Tumbang	2 Buah Pohon Tumbang	Regu 3 Bjb
34	Rabu, 6/12/2023 14.34	Halaman Kantor Setda Prov Kalsel	Banjarbaru	Penyelamatan Manusia	Korba Pingsan	Regu 3 Bjb

Target untuk Indikator Jumlah Kab/Kota yang Tanggap Penanganan Bahaya Kebakaran pada Tahun 2023 adalah 13 Kabupaten/Kota, pencapaian indikator kinerja yang terealisasi sebanyak 13 Kabupaten/Kota dari target

yang sudah ditetapkan, sehingga presentasi capaian pada tahun 2023 sebesar 100 %.

Rumus perhitungan Jumlah Kab/Kota yang Tanggap Penanganan Bahaya Kebakaran adalah sebagai berikut :

$$\% \text{ Jumlah Kab/Kota yang Tanggap} = \frac{\Sigma \text{ jumlah Kab/kota yang tanggap}}{\Sigma \text{ target Jumlah Kab/Kota yang Tanggap}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Jumlah Kab/Kota yang Tanggap} = \frac{\Sigma 13 \text{ Kabupaten/Kota}}{\Sigma 13 \text{ Kabupaten/Kota}} \times 100\% = \mathbf{100 \%}$$

2) **Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;**

- a. Jumlah aparaturnya Damkar yang terampil  
Realisasi kinerja pada tahun 2023 sama dengan tahun 2022 yaitu sebanyak 8 orang.
- b. Target untuk Indikator Presentase Kejadian Kebakaran dan Dampak Kebakaran yang Ditangani pada Tahun 2023 adalah 100 %, pencapaian indikator kinerja yang terealisasi sebesar 100 % dari target yang sudah ditetapkan, sama dengan tahun 2022 dimana realisasi sebesar 100 % dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan kejadian kebakaran pemukiman selama tahun 2023 intensitas kejadian tidak sebanyak pada tahun sebelumnya dan curah hujan yang banyak.
- c. Jumlah Kabupaten/Kota yang tanggap penanganan bahaya kebakaran untuk tahun 2023 sebanyak 13 kabupaten/Kota sama dengan tahun 2022 dimana realisasi sebanyak 13 Kabupaten/Kota. Dimana hasil monitoring dan evaluasi diharapkan tiap Kabupaten/kota selalu tanggap dalam menghadapi bahaya kebakaran baik dari sarana prasarana maupun aparaturnya beserta relawan di tiap daerah.

3) **Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja**

3.1 Upaya yang telah dilakukan :

- a. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi ke Kabupaten/kota dalam hal pelaksanaan SPM kebencanaan
- b. Telah didukung dengan sarana dan prasarana unit kebakaran
- c. Pembentukan anggota piket/posko 24 jam dengan pembagian 3 shift.
- d. Dalam hal pelaporan kejadian kebakaran sudah disosialisasikan ke Kabupaten/kota agar menggunakan format satu data sehingga ada

kesamaan pelaporan data sehingga memudahkan dalam pengintegrasian data kejadian kebakaran se Provinsi Kalimantan Selatan.

- 3.2 Hambatan dalam pencapaian kinerja :
- Perlunya peningkatan/penambahan sarana dan prasarana kebakaran yang dilaksanakan oleh OPD Satpol PP & Damkar secara bertahap dalam tahun ini.
- 3.3 Rencana tidak lanjut :
- a. Peningkatan alokasi anggaran APBD/penambahan unit pemadam kebakaran yang dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2024.

b. Adanya inovasi baru penyebarluasan informasi melalui teknologi/aplikasi yang membantu meningkatkan dalam hal pelaporan kejadian kebakaran yang memudahkan mendapat informasi data kebakaran.

c. Akan melaksanakan rapat koordinasi rutin triwulanan dengan kabupaten/kota se Kalimantan Selatan.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja adalah :
- Penambahan sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran
  - Peningkatan SDM anggota Damkar yang terlatih setelah mengikuti Bimtek/pelatihan Pemadam Kebakaran.
  - Penambahan personel anggota Damkar yang baru

5. Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Personil

NO	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Peningkatan pemenuhan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaranr	Pelatihan Kemampuan Satpol PP dan Damkar Prov Kalsel	65 orang	110 orang	100%
		Melaksanakan Uji Kompetensi Bagi Satpol PP dan Damkar Prov.Kalsel	100%	100%	100 %

		Memberikan Fasilitas Pengembangan SDM Satpol PP dan Damkar Kab/Kota	65 orang	65 orang	100 %
Rata-rata Capaian					100 %

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi Tahun 2023		
		2022	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah Aparatur Satpol PP dan Damkar yang lulus Pelatihan kemampuan Teknis	65 org	65 orang	100 orang	100%
2	Persentase kelulusan Uji Kompetensi Bagi Satpol PP dan Damkar Prov Kalsel	4 org	100%	100%	100%
3	Jumlah Aparatur Satpol PP dan Damkar Kab/Kota yang terfasilitasi dalam Pengembangan SDM(Ket.orang/Pejabat pada Kab/Kota terkait penyelenggaraan SDM Satpol PP & Damkar	36 org	65 orang	65 orang	100%
Rata-rata Capaian					100%

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Pencapaian Indikator Jumlah Aparatur Satpol PP dan Damkar yang lulus Pelatihan kemampuan Teknis Tahun 2023 terealisasi sebanyak 100 orang dari target 65 orang sehingga persentase capaian pada tahun 2023 sebesar 100%.

Pencapaian Indikator Persentase kelulusan Uji Kompetensi Bagi Satpol PP dan Damkar Prov Kalsel tahun 2023 terealisasi sebanyak 100% dari target 100%, sehingga persentase capaian pada tahun 2023 sebesar 100%.

Pencapaian Indikator Jumlah Aparatur Satpol PP dan Damkar Kab/Kota yang terfasilitasi dalam Pengembangan SDM(Ket.orang/Pejabat pada Kab/Kota terkait penyelenggaraan SDM Satpol PP & Damkar tahun 2023 terealisasi sebanyak 65 orang dari target 65 orang sehingga persentase capaian pada tahun 2023 sebesar 100%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

- a. Jumlah Aparatur Satpol PP dan Damkar yang lulus Pelatihan kemampuan Teknis  
Jumlah Aparatur Satpol. PP & Damkar Provinsi Kalimantan Selatan yang mendapatkan pelatihan teknis dan fungsional telah mencapai target, dengan realisasi pencapaian 100 orang personil (100%). Pencapaian realisasi dimaksud tidak lepas dari dukungan perencanaan dan penganggaran, Pelatihan teknis dan

fungsional pada Satpol. PP & Damkar tidak lepas dari dukungan personil dari bidang – bidang teknis terkait dan seksi kesamptaan (internal bidang) dalam mempersiapkan personil untuk mengikuti pelatihan teknis & Fungsional yang telah direncanakan.

- b. Persentase kelulusan Uji Kompetensi Bagi Satpol PP dan Damkar Prov Kalsel  
Pencapaian realisasi Persentase kelulusan Uji Kompetensi Bagi Satpol PP dan Damkar Prov Kalsel dengan persentase 100% dapat kita capai setiap tahun nya dengan berpedoman pada kegiatan dan program yang telah kita susun secara berkala dan terstruktur sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan koordinasi yang baik dengan semua instansi terkait
- c. Jumlah Aparatur Satpol PP dan Damkar Kab/Kota yang terfasilitasi dalam Pengembangan SDM(Ket.orang/Pejabat pada Kab/Kota terkait penyelenggaraan SDM Satpol PP & Damkar 65 orang, dalam rangka meningkatkan kerjasama dengan Kabupaten/Kota maka Satpol. PP & Damkar Provinsi Kalimantan Selatan memfasilitasikan dengan BPSDM dalam mengikuti pengembangan peningkatan Sumber Daya Aparatur.

### **3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja**

Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan serta alternative solusi yang telah dilakukan

#### **a. Upaya yang telah dilakukan**

Dalam rangka meningkatkan kinerja bagi aparatur Satpol. PP & Damkar setiap tahun kami melaksanakan Pelatihan Teknis Aparatur Satpol. PP & Damkar, melantik jabatan fungsional Pol. PP dan Damkar pada Tahun 2019 sebanyak 8 orang( 3 Jenjang Ahli dan 5 jenjang Terampil),Tahun 2023 melantik sebanyak 7 orang ( 3 orang jenjang ahli dan 4 jenjang terampil). Dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur yang handal, serta memonitoring untuk pembinaan pengembangan kapasitas personil serta jabatan fungsional POL. PP & Damkar di Kabupaten/Kota dengan mengikutkan Kabupaten/Kota dalam pengembangan SDA. Yang mana hasil koordinasi monitoring kabupaten/kota hampir kurang lebih 150 Orang untuk peningkatan Jafung POL PP di Tahun 2023.

#### **b. Hambatan dalam pencapaian kinerja**

Terbatasnya alokasi program kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas personil baik yang dilaksanakan oleh instansi Pembina maupun yang dilaksanakan di daerah.Kurangnya personil yang berkualitas karena banyak personil yang ijasah terakhirnya hanya SMA saja, sedangkan dalam pelatihan, diklat yang dibutuhkan yang mempunyai ijasah paling rendah S1. Kurangnya minat personil Satpol. PP & Damkar yang mau menduduki jabatan fungsional Pol. PP dan PPNS Pol. PP karena kurangnya sumber daya aparatur yang kurang memadai.



c. Rencana tindak lanjut

Menyampaikan usulan kepada instansi Pembina agar alokasi program dan kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas personil dapat ditingkatkan. Melaksanakan pelatihan dan pendidikan sesuai dengan program kegiatan yang kita butuhkan untuk meningkatkan sumberdaya aparatur Satpol. PP & Damkar. Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Kabupaten/Kota dalam meningkatkan SDM Satpol. PP dan Kerjasama dalam hal teknis kegiatan dilapangan.

Untuk memaksimalkan pemberdayaan kerjasama Satpol. PP dan Damkar Provinsi dengan Kabupaten/Kota dalam melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan perkara.

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

- 1. Keberhasilan atas pencapaian kinerja dalam meningkatkan Aparatur Satpol.PP dan Damkar berpengaruh dengan sasaran strategis dalam hal ini kita terus menunjang dan memberikan Fasilitas dan pembinaan dalam meningkatkan personil Satpol. PP yang handal.
- 2. Dalam meningkatkan kapasitas personil melalui kegiatan diklat PPNS penegak Perda dengan adanya personil yang sudah memiliki sertifikat penyidik, maka akan berpengaruh dan meningkatkan rasa percaya diri personil Satpol. PP dalam menegakkan Perda dan Perkada dibanui kita ini.
- 3. Peningkatan kapasitas personil melalui pembentukan jabatan fungsional (jafung) merupakan amanah dari Peraturan Perundang – undangan, sehingga dapat membantu pejabat struktural dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang sudah tercantum dalam keputusan Presiden Nomor 59/P 2011. Sehingga pejabat jafung dapat mengembangkan karirnya sendiri.

6. Kepala Seksi Bina Kesamaptaan

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatan kualitas sumberdaya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Prov.Kalsel	Pelatihan Kesamaptaan Satpol PP dan Damkar	36 orang	36 orang	100%
		Pemeriksaan Jasmani Bagi Satpol PP dan Damkar	36 orang	36 orang	100%



NO.	INDIKATOR KINERJA	Realisasi	Realisasi Tahun 2022		
		2021	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang lulus kesamptaan	36 org	36 org	36 org	100%
2.	Jumlah Personil Yang Lulus standar jasmani Satpol PP & Damkar	36 org	36 org	36 org	100%

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Adapun realisasi Jumlah Sumber Daya Aparatur yang lulus Kesamptaan pada tahun 2023 sejumlah 36 orang, dari target sejumlah 36 orang atau telah terlaksana 100%. Yang terakomodinir melalui kegiatan Pelatihan rutin kesamptaan dan Pelatihan Karate, Ghasuku dan Tes Kesamptaan.

Adapun realisasi Jumlah Personil Yang Lulus standar jasmani Satpol PP & Damkar pada tahun 2023 sejumlah 36 orang, dari target sejumlah 36 orang atau telah terlaksana 100%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

- a. Realisasi Jumlah Sumber Daya Aparatur yang lulus kesamptaan pada tahun 2023 sejumlah 36 orang, dari target sejumlah 36 orang dengan capaian 100%
- b. Realisasi jJumlah Personil Yang Lulus standar jasmani Satpol PP & Damka pada tahun 2023 sejumlah 36 orang, dari target sejumlah 36 orang dengan capaian 100%.

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Pada tahun 2023 penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol. PP & Damkar tidak menurun, bahkan cenderung meningkat. Kondisi fisik dan mental personil yang prima sangat dibutuhkan untuk kondisi saat ini, segala upaya dilakukan dengan melakukan pengembangan kapasitas personil, memberdayakan anggaran, dan sarpras minimal untuk memperoleh hasil yang terbaik.

- 1. 1. Upaya – upaya yang dilakukan

- a. Melakukan koordinasi dengan bidang – bidang teknis secara rutin dan berkala, untuk memperoleh saran dan masukan dalam rangka pembinaan kesamaptaaan personil Satpol PP dan Damkar.
- b. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait, dalam rangka mendukung bina kesamaptaaan pada Satpol. PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Selatan
- c. Melakukan perencanaan kegiatan yang terkait dengan pengembangan kapasitas personil

#### 1.2 Hambatan dalam pencapaian kinerja

- a. Kegiatan yang telah diagendakan seringkali terbentur dengan kegiatan lain (tugas Pol. PP & Damkar), sehingga personil yang diberikan pelatihan terbatas jumlahnya/kurang efektif.

#### 1.3 Rencana tindak lanjut

- a. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan konsolidasi kegiatan Bina Kesamaptaaan dengan bidang – bidang teknis
- b. Menyusun program dan kegiatan dengan skala prioritas guna peningkatan kemampuan kesamaptaaan Anggota Satpol. PP & Damkar.

### 4. Analisa Program / Kegiatan Penunjang Kinerja

Seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh Seksi Bina Kesamaptaaan baik itu pembinaan fisik kesamaptaaan maupun pelatihan beladiri karate, dimaksudkan untuk mempersiapkan fisik dan mental personil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, memberikan bekal pengetahuan beladiri yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan diri personil ketika bertugas, sehingga hambatan dilapangan terkait dengan keamanan personil dapat terjaga tetapi tetap dilandasi dengan sikap yang humanis dan mengedepankan fungsi Perlindungan Masyarakat. Dengan suksesnya kegiatan Bina Kesamaptaaan, harapannya adalah dapat memberikan dukungan kepada Bidang Teknis dalam mencapai sasaran program kegiatannya secara maksimal.

7. Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian

NO	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatkan penyelesaian permasalahan ketentraman dan ketertiban umum	Patroli Pengamanan Objek Vital Pemerintah Provinsi dan Pengamanan serta Pengawasan Pejabat Negara	13 Kab/Kota	13 Kab/kota	100%
		Sosialisasi Trantibum	26 Kegiatan	26 Kegiatan	100%
Rata-rata Capaian					

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2023		
		2022	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah Wilayah yang Dilaksanakan Patroli gabungan dengan satpol pp kabupaten/kota	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	100%
2	Jumlah Objek Vital atau Pejabat yang Diamankan	6 Objek	6 Objek	6 Objek	100%
3	Jumlah kegiatan sosialisasi lapangan pada patroli yang dilaksanakan	26 Kegiatan	26 Kegiatan	26 Kegiatan	100%
Rata-rata Capaian					100%

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Pencapaian Indikator Jumlah Wilayah yang Dilaksanakan Patroli gabungan dengan satpol pp kabupaten/kota Tahun 2023 terealisasi sebanyak 13 Kab/Kota dari target 13 Kab/Kota sehingga persentase capaian pada tahun 2023 sebesar 100%.

Pencapaian Indikator Jumlah Objek Vital dan Pejabat Yang Diamankan Tahun 2023 terealisasi sebanyak 6 Objek dari target 6 Objek sehingga persentase capaian pada tahun 2023 sebesar 100%.

Pencapaian Indikator Jumlah kegiatan sosialisasi lapangan pada patroli yang dilaksanakan Tahun 2023 terealisasi sebanyak 26 Kegiatan dari target 26 Kegiatan sehingga persentase capaian pada tahun 2023 sebesar 100%.

## **2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait**

- a. Jumlah Wilayah yang Dilaksanakan Patroli gabungan dengan satpol pp kabupaten/kota

Pada Tahun 2023 Jumlah Wilayah yang Dilaksanakan Patroli gabungan dengan satpol pp kabupaten/kota sebanyak 13 kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan Meliputi Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kab Hulu Sungai Tengah, Kab Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong, dibandingkan dengan Tahun 2023 Jumlah Wilayah yang dilaksanakan Patroli sama dengan Tahun Sebelumnya.

- b. Jumlah Objek Vital dan Pejabat Yang Diamankan

Pada Tahun 2023 Jumlah Objek Vital dan Pejabat yang diamankan sebanyak 6 Objek yang Meliputi Pengamanan Pejabat Daerah dan Pejabat Pusat (Gubernur Kalimantan Selatan, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Sekertaris daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Presiden, Wakil Presiden dan Menteri yang melakukan Kunjungan di provinsi Kalimantan selatan) dan Objek Vital diantaranya Rumah Dinas Gubernur Kalimantan Selatan, Rumah Dinas Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Rumah Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Eks Kantor Gubernur Kalimantan Selatan Banjarmasin, dan Kantor Kantor Gubernur Kalimantan Selatan Banjarbaru. Dibandingkan dengan Tahun 2023 jumlah Objek Vital dan Pejabat yang diamankan sama dengan tahun sebelumnya.

- c. Jumlah kegiatan sosialisasi lapangan pada patroli yang dilaksanakan

Pada Tahun 2023 ada Sebanyak 26 Kegiatan Lapangan yang dilaksanakan Sosialisasi Trantibum terhadap Pengamanan Unjuk Rasa/Massa, dibandingkan dengan Tahun 2023 Jumlah Sosialisasi Trantibum yang dilaksanakan sama dengan Tahun Sebelumnya.

## **3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja**

- a. Upaya yang telah dilakukan

Dalam Pencapaian Kinerja Tersebut berbagai upaya telah dilakukan diantaranya pelatihan teknis terkait kegiatan Pengamanan, Perencanaan Awal Setiap Sebelum Giat di Lapangan dan Evaluasi pada Semua Kegiatan Yang dilaksanakan agar segala Sesuatunya bisa Sesuai Rencana Awal

- b. Hambatan dalam pencapaian kinerja

Pada setiap Pelaksanaan Kegiatan Pasti ada Kendala Teknis Baik Sebelum Pelaksanaan, dalam Pelaksanaan dan Setelah Pelaksanaan Kegiatan. Dalam Pelaksanaan Kegiatan Biasanya yang sering menjadi kendala berupa kurangnya

jumlah Petugas Operasional dan terbatasnya sarana operasional lapangan yang dalam hal ini adalah kendaraan operasional untuk mobilitas anggota di Lapangan

c. Rencana tindak lanjut

Untuk Kedepannya dalam setiap pelaksanaan kegiatan diupayakan memaksimalkan setiap sumber daya yang ada agar setiap kegiatan yang dilaksanakan dilapangan dapat berjalan dengan aman,lancar dan tertib.

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pada Setiap Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tersebut diatas tidak terlepas dari segala dukungan program dan kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan Baik dalam bentuk pelatihan Teknis di Lapangan Bagi Seluruh Anggota Operasional Maupun Bantuan dalam Bentuk Dukungan Teknis Sarana Operasional dalam Pelaksanaan Tugas Dilapangan Bagi Anggota.

8. Kepala Seksi Kerja Sama

NO	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat/Aparatur dan Lembaga/Organisasi Terhadap Peraturan mengenai Ketertiban Umum	Memfasiltasi Permasalahan Trantibum	100%	100 %	100%
Rata-rata Capaian					100%

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2023		
		2022	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Permasalahan Trantibum yang Di Tindaklanjuti	13 kab/kota	100%	100%	100 %
Rata-rata Capaian					100%

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Pencapaian Indikator Persentase Permasalahan Trantibum yang di tindaklanjuti Tahun 2023 terealisasi sebanyak 100% dari target 100% sehingga persentase capaian pada tahun 2023 sebesar 100%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

a. Persentase Permasalahan Trantibum yang Di Tindaklanjuti

Realisasi Kinerja dapat dimaksimalkan jika di bandingkan dengan tahun 2022 mengalami perbedaan dimana target & indikator sebesar 84%. Hal ini disebabkan pada sebagian permasalahan yang difasilitasi pada tahun 2022 dilakukan lagi fasilitasi di tahun 2023, sebagai contoh adalah penegakkan permasalahan Tibum dan Tranmas lintas Kab/Kota se Provinsi Kalimantan Selatan maupun dibatas wilayah Provinsi Kalimantan Kalimantan Selatan.

Permasalahan yang difasilitasi pada Tahun 2023 adalah :

1. Fasilitasi dalam bentuk Tim Kerjasama yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/043/KUM/2021 tentang Pembentukan Tim Kerjasama Penegakan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah serta Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Lintas Kabupaten/Kota dan Wilayah Perbatasan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023.
2. Serta Memfasilitasi kegiatan kesiapsiagaan Sat Pol PP pada Natal dan Tahun 2024.

### **3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja**

#### **a. Upaya yang telah dilakukan**

Upaya yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia pada SUB Kegiatan pada Seksi Kerjasama yaitu Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik pencegahan kejahatan dengan mengaitkan pada kegiatan lain yang relevan dengan kegiatan pokok, sebagai contoh adalah dengan sub kegiatan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan yang sama dikoordinasi secara struktur pada bidang Tibum dan Transmas Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Selatan.

Memaksimalkan Anggaran Yang Tersedia dengan Mengaitkan Kegiatan Yang Relavan dengan Kegiatan Yang Pokok

#### **b. Hambatan dalam pencapaian kinerja**

Hambatan yang menjadi penyebab dalam pencapaian kinerja disebabkan oleh faktor internal dan eskternal. Faktor internal adalah adanya perubahan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan yang menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi. Faktor dari eksternal kondisi trantibum dan tranmas yang relatif kondusif sehingga tidak memerlukan fasilitasi – fasilitasi dalam penanganannya.

Data Yang Kurang Proporsional dalam Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Sehingga Kegiatan Operasional gabuangan Tidak Terealisasi.

#### **c. Rencana tindak lanjut**

Rencana tindaklanjut adalah dengan melakukan koordinasi dan evaluasi internal serta Menyusun rencana kegiatan yang dikoordinasikan Bersama, sehingga sinkronisasi kegiatan benar – benar terwujud yang bermuara pada capaian kinerja lebih meningkat sehingga porsi anggaran yang tersedia dapat diserap secara maksimal dengan tetap mengedepankan prinsip, efektif, efisien dan akuntabel. Melakukan Koordinasi internal agar porsi anggaran dalam mendukung kegiatan dapat terakomodir sehingga capaian kinerja dapat lebih meningkat.

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

- a. Pengembangan Program Kegiatan Yang relevan  
Pengembangan Program yang relevan dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan mapping kegiatan ditubuh Satpol.PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Selatan.Pada prinsipnya seksi Kerjasama siap mengakomodir kegiatan dan pengembangan kegiatan lainnya yang disesuaikan dengan uraian tugas pada seksi Kerjasama.
- b. Dukungan dari Bidang-bidang teknis yang lain  
Dukungan dari bidang teknis lainnya sangat diperlukan dalam mendukung kelancaran kegiatan maupun capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Kasi Kerjasama. Selain dari bidang teknis juga diperlukan dukungan dan Kerjasama dari Satpol. PP Kab/Kota dan Lembaga lainnya dalam hal koordinasi dan teknis pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c. Dukungan Satpol PP dan Kab/Kota dan Instansi Terkait Lainnya dalam koordinasi dan kerjasama pelaksanaan Kegiatan.

9. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

NO	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Pelayanan Administrasi Keuangan	Menyusun Perencanaan dan Administrasi Keuangan SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
Rata-rata Capaian					

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2023		
		2022	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Secara Berkala	1 dok	1 dok	1 dok	100%
2	Jumlah Aset Yang Tercatat	1 dok	1 dok	1 dok	100%
3	Jumlah Dokumen Terkait Sarana dan Prasana	1 dok	1 dok	1 dok	100%
Rata-rata Capaian					100%

## 1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Pencapaian Indikator Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Secara Berkala Tahun 2023 terealisasi sebanyak 1 dokumen dari target 1 dokumen laporan , sehingga persentase capaian pada tahun 2023 sebesar 100 %.

Pencapaian Indikator Jumlah Aset Yang Tercatat tahun 2023 terealisasi sebanyak 1 dokumen dari target 1 dokumen sehingga persentase capaian pada tahun 2023 sebesar 100%.

Pencapaian Indikator Jumlah Dokumen Terkait Sarana dan Prasana tahun 2023 terealisasi sebanyak 1 dokumen dari target 1 dokumen sehingga persentase capaian pada tahun 2023 sebesar 100%.

## 2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

### a. Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Secara Berkala

Penyusunan Dokumen laporan Keuangan pada tahun 2023 terealisasi sebanyak 1 dokumen laporan yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dengan capaian 100 % (seratus persen) begitu juga dengan tahun 2022 yang terealisasi 1 dokumen laporan. Adapun dokumen laporan keuangan ini menyajikan diantaranya **Neraca** yaitu menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu, **Laporan Operasional (LO)** yaitu hak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang diakui sebagai ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah, **Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)** yang mana ekuitas tersebut adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah, yaitu selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban, **Laporan Realisasi Anggaran (LRA)** yaitu semua penerimaan pada Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran lebid dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah, **Laporan Persediaan** yang mana persediaan tersebut adalah asset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional SKPD dan juga asset yang terdiri atas asset lancar, asset tetap dan asset lainnya. Asset tetap yaitu asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum sedangkan asset lainnya adalah asset tetap yang diberhentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan tidak memenuhi definisi asset tetap sesuai dengan nilai tercatatnya.

### b. Jumlah Aset Yang Tercatat

Pencatatan asset dalam bentuk dokumen terealisasi pada tahun 2023 sebanyak 1 (satu) dokumen dengan target 1 (satu) dokumen dengan capaian



100% (seratus persen) yang dikompilasi dalam satu laporan keuangan, begitu juga dengan tahun 2022 dan tahun sebelumnya, adapun asset yang tercatat dalam satu dokumen dimaksud yaitu barang / perlengkapan yang telah dibeli atau diperoleh atas yang dibebankan pada DPA SKPD Satpol. PP & Damkar Provinsi Kalimantan Selatannya yang terdiri atas Tanah, Peralatan Mesin, Gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, asset tetap lainnya.

c. Jumlah Dokumen Terkait Sarana dan Prasana

Penyimpanan dokumen terkait sarana dan prasarana sebanyak 1 (satu) dokumen pada tahun 2023 yang ditargetkan sebanyak 1 (satu) dokumen dengan pencapaian 100% (seratus persen) begitu juga dengan tahun sebelumnya, sebagai contoh seperti pembelian/perolehan atas peralatan mesin yang terdiri atas alat – alat angkutan (mobil baik itu truck) angkutan penumpang dan / barang) yang mempunyai dokumen (STNK, BPKB) disimpan oleh pengurus barang dalam satu dokumen, begitu juga barang milik daerah lainnya yang dilaporkan secara periodek kepada Badan Keuangan Daerah cq idang Pengelolaan Barang Milik Daerah (aset).

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan serta alternative solusi yang telah dilakukan

a. Upaya yang telah dilakukan

Koordinasi kepada SKPD Pembina dalam penyelesaian laporan keuangan baik itu penyusunan laporan keuangan, pencatatan asset dan penyimpanan dokumen khususnya bidang akuntansi pengelolaan barang milik daerah (asset) sebagai salah satu upaya untuk mengolah data yang akuntabel.

b. Hambatan dalam pencapaian kinerja

Tidak ada hambatan.

c. Rencana tindak lanjut

Karena tidak adanya hambatan maka tidak ada rencana tindak lanjut, namun pola – pola seperti koordinasi secara intensif terus dilakukan baik melalui rekonsiliasi data hardcopy maupun softcopy dan lainnya juga.

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program Pelayanan Administrasi Keuangan dengan kegiatan penyediaan jasa adminitrasi keuangan sebesar Rp. 186.600.000. Yang mana pembayaran untuk honorarium pengurus gaji, petugas verifikator dan penyiap SPP / SPM yang tidak boleh dibayarkan, maka ada anggaran yang tidak terserap dengan maksimal.

Adanya perubahan peraturan dan kebijakan sistem pembayaran TTP .

Dimana ada perubahan TTP yang biasanya dibayarkan Tanggal 15 Bulan berikutnya dibayar lebih awal di Bulan Desember 2023, sehingga terjadi kekurangan Anggaran untuk pembayaran Tunjangan Kinerja.

10. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

NO	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Pelayanan Sarana dan Prasarana Administrasi Perkantoran	Jumlah dokumentasi pelayanan surat – menyurat	360	1777	493,61%
		Jumlah administrasi kepegawaian yang dilayani secara tertib	50	58	118%
		Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan bersertifikasi	5	51	1020%
Rata-rata Capaian					100%

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2023		
		2022	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah Dokumentasi Pelayanan Surat Menyurat	654 Dok	360Dok	1777	493,61%
2	Jumlah Pegawai Yang Adminstrasi Kepegawaiannya dilayani Secara Tertib	59 Dok	50 Dok	58	116%
3	Jumlah ASN Yang Mengikuti Pelatihan	54 Org	5 Org	51	1020%
Rata-rata Capaian					100%

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Pencapaian Indikator Jumlah Dokumentasi Pelayanan Surat Menyurat Tahun 2023 terealisasi sebanyak 1777 dokumen (yang terdiri dari pelayanan surat keluar, surat Keputusan Kepala Satuan dan pelayanan penomoran Surat Perintah Tugas) baik yang dilaksanakan penadatanganan secara elektronik TTE ataupun tanda tangam basah dari target 360 dokumen, sehingga persentase capaian pada tahun 2023 sebesar 493,61 %.

Pencapaian Indikator Jumlah Pegawai Yang Administrasi Kepegawaian dilayani Secara Tertib tahun 2023 terealisasi sebanyak 58 dokumen berkas kepegawaian (perorangan) baik dari sisi kenaikan Pangkat, Gaji Berkala, Dokumen Cuti, Koordinasi SK Jabatan dan SK Penempatan Pelaksana dari target 50 dokumen, sehingga persentase capaian pada tahun 2023 sebesar 118 %.

Pencapaian Indikator Jumlah ASN Yang Mengikuti Pelatihan tahun 2023, Dimana sesuai ketentuan di dalam UU 5 Tahun 2014 tentang ASN sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2023 tentang ASN, bahwa setiap ASN mempunyai hak pelatihan pengembangan karir minimal 20jp setiap tahun, bahwa pada Satpol PP dan Damkar seluruh PNS sebanyak 51 orang telah mengikuti pelatihan minimal 20 jp / tahun, sehingga IP ASN Satpol PP dan Damkar Prov.Kalsel berada pada angka 76,79 atau berada diatas rata-rata IP ASN Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan realisasi sebanyak 51 orang dari target 5 , sehingga persentase capaian pada tahun 2023 sebesar 1020%.

## **2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait**

### **a. Jumlah Dokumentasi Pelayanan Surat Menyurat**

Pencapaian Jumlah Dokumentasi Pelayanan Surat Menyurat pada tahun 2023 yang terdiri dari 1777 Surat Keluar, SK (Surat Keterangan) dan Nota Dinas/Persetujuan.

### **b. Jumlah Pegawai Yang Administrasi Kepegawaian dilayani Secara Tertib**

Pencapaian Jumlah Pegawai Yang Administrasi Kepegawaiannya dilayani Secara Tertib pada tahun 2023 sebanyak 58 dokumen yang dilayani terhadap kepangkatan, Pensiun dan berkala ASN di lingkungan Satpol PP & Damkar Prov. Kalsel

### **c. Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas SDM**

Pencapaian Jumlah ASN Yang Mengikuti Pelatihan pada tahun 2022 sebanyak 51 orang dari target 5. Peningkatan terhadap pengelolaan keuangan, bendahara barang, arsiparis, operator aplikasi di keuangan dan bimtek kepegawaian lainnya.

## **3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja**

Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan serta alternative solusi yang telah dilakukan

### **a. Upaya yang telah dilakukan**

Melaksanakan program yang sudah tersusun secara maksimal dengan melaksanakan koordinasi di Internal kesekretariatan

### **b. Hambatan dalam pencapaian kinerja**

Terbatasnya SDM pelaksana, karena hanya ada 1 (satu) staf pelaksana yang membantu secara keseluruhan pelaksanaan program dimaksud ditambah pendataan data tenaga honorer.

- d. Rencana tindak lanjut  
Perlu perbaikan pentapan target kinerja uang lebih akurat.
- e. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja
- a. Jalannya program sarana prasarana administrasi perkantoran didukung koordinasi yang baik di Internal Sekretariat sebagai penunjang kinerja Satuan
  - b. Dari ASN yang ada pada Satuan, terkait pelayanan administrasi perkantoran bahwa tidak semua pegawai /ASN yang berurusan dengan administrasi kepegawaian seperti Pensiun, Mutasi, Naik Pangkat, Kenakaikan Gaji Berkala setiap tahunnya.
  - c. Perlu perbaikan penetapan target kinerja baik secara administrasi dalam dalam mengejar target.

11.Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

NO	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Menyusun perencanaan dan pelaporan kinerja Satpol PP Damkar	5 Laporan	5 Laporan	100%
Rata-rata Capaian					

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2023		
		2022	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah Dokumen Kinerja yang disusun sesuai ketentuan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
Rata-rata Capaian					100%

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Pencapaian Indikator Jumlah Dokumen Kinerja yang disusun sesuai ketentuan Tahun 2023 terealisasi sebanyak 5 Laporan dari target 5 Dokumen,yaitu ; LAKIP, LKPJ/SPM, RENSTRA, RENJA, PRA-RKA) sehingga persentase capaian pada tahun 2023 sebesar 100%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

- a. Jumlah Dokumen Kinerja yang disusun sesuai ketentuan

Pada tahun 2023 jumlah Laporan Perencanaan dan Pelaporan 5 Dokumen, dibandingkan dengan Tahun 2022 jumlah Laporan Perencanaan dan Pelaporan yang tercapai 5 Dokumen.

### **3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja**

a. Jumlah Dokumen Kinerja yang disusun sesuai ketentuan.

Jumlah Dokumen Kinerja yang disusun sesuai ketentuan Tahun 2023 sebanyak 5 Dokumen untuk SKPD Satpol PP & Damkar yang direncanakan dan disiapkan.

### **4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja**

Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan program-program di Satpol PP & Damkar yang dilaksanakan selama tahun 2023 yaitu :

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  
Evaluasi dan Analisa Kinerja

Secara umum pencapaian kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran rata-rata dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan target yang ingin dicapai, dan ditingkatkan lagi dengan melakukan koordinasi semua unsur sumber daya yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran agar program dan kegiatan dapat tercapai sesuai dengan target dalam mencapai sasaran kinerja yaitu dengan :

1. Meningkatkan kinerja pejabat dari eselon II, III, dan IV agar program dan kegiatan yang berjalan dapat terlaksana secara maksimal sehingga realisasi capaian kinerja sesuai target.
2. Melakukan pengukuran kinerja individu sampai dengan eselon IV secara berkala agar indikator kinerja dapat tercapai sesuai target. Peningkatan Sumber Daya Aparatur melalui sarana dan sumber daya manusianya.

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>	<b>11.151.669.590</b>	<b>10.773.717.370</b>	
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>17.120.300</b>	<b>16.498.000</b>	<b>96,4</b>
01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.610.000	10.217.750	96,3
01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.510.300	6.280.250	96,5
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>8.918.810.390</b>	<b>8.746.884.244</b>	<b>98,1</b>
02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.732.210.390	8.573.284.244	98,2
02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	186.600.000	173.600.000	93,0
<b>5</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>156.380.000</b>	<b>154.070.000</b>	<b>98,5</b>
05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	156.380.000	154.070.000	98,5
<b>6</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>806.994.900</b>	<b>726.651.242</b>	<b>90,0</b>
06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.000.000	46.422.300	96,7
06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	323.200.000	322.740.000	99,9
06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.697.900	15.476.800	98,6
06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.500.000	9.480.000	99,8
06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	410.597.000	332.532.142	81,0
<b>7</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>527.130.000</b>	<b>524.708.000</b>	<b>99,5</b>
07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	342.680.000	342.680.000	100
07.05.	Pengadaan Mebel	27.000.000	27.000.000	100
07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	157.450.000	155.028.000	98,5
<b>8</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>190.580.000</b>	<b>166.639.615</b>	<b>87,4</b>
08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.880.000	18.259.615	52,3
08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	155.700.000	148.380.000	95,3
<b>9</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>534.654.000</b>	<b>438.266.269</b>	<b>82,0</b>

09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	226.734.000	179.406.260	79,1
09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	307.920.000	258.860.009	84,1
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>18.166.663.765</b>	<b>17.595.805.155</b>	
<b>1</b>	<b>Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>17.723.612.965</b>	<b>17.228.162.584</b>	<b>97,2</b>
01.01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	15.323.284.630	15.003.776.882	97,9
01.02	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	99.996.400	97.996.400	98,0
01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	100.000.000	78.815.000	78,8
01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	774.999.800	759.132.005	98,0
01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	1.026.183.585	909.854.971	88,7
01.06	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	99.999.750	97.025.626	97,0
01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	223.539.000	215.821.000	96,5
01.08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	15.609.800	15.445.000	98,9
01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	60.000.000	50.295.700	83,8
<b>2</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur</b>	<b>313.050.800</b>	<b>288.284.565</b>	<b>92,1</b>
02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	88.348.100	79.935.600	90,5

02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	98.666.900	87.991.519	89,2
02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	126.035.800	120.357.446	95,5
3	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi</b>	<b>130.000.000</b>	<b>79.358.006</b>	<b>61,0</b>
03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	50.000.000	8.303.700	16,6
03.02	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditepat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	80.000.000	71.054.306	88,8
	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>4.694.032.300</b>	<b>4.457.775.745</b>	
1	<b>Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran</b>	<b>4.694.032.300</b>	<b>4.457.775.745</b>	<b>95,0</b>
01.01.	Penyediaan dan Pemuktahiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	200.000.000	190.758.350	95,4
01.03.	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	2.503.121.300	2.290.076.223	91,5
01.05.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1.990.911.000	1.976.941.172	99,3
<b>TOTAL</b>		<b>34.012.365.655</b>	<b>32.827.298.270</b>	<b>96,5</b>

## 2. Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program

Berdasarkan hasil Laporan Keuangan per 31 Desember 2023 jumlah anggaran kegiatan belanja langsung Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan sebesar **Rp34.012.365.655** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 32.827.298.270** atau sebesar **96,51 %** dan realisasi fisik **100%**, dengan rincian sebagai berikut :

### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

Total alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp. 11.151.669.590

Realisasi keuangan sampai dengan akhir tahun 2023 mencapai Rp. 10.773.717.370 atau sebesar 96,61%. Realisasi fisik program ini mencapai 100% dengan kegiatan :

a. *Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan*

- *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah:*



Alokasi Dana Kegiatan ini sebesar Rp. 10.610.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.217.750 atau sebesar 96,3% dan realisasi fisik 100%.

- *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*

Alokasi Dana Kegiatan ini sebesar Rp. 6.510.300 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.280.250 atau sebesar 96,47% dan realisasi fisik 100%.

b. *Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :*

- *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 8.732.210.390 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.573.284.244 atau sebesar 98,18% dengan realisasi fisik 100%.*
- *Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 186.600.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 173.600.000 atau sebesar 93,03% dengan realisasi fisik 100%*

c. *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :*

- *Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 156.380.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 154.070.000 atau sebesar 98,52% dengan realisasi fisik 100%.*

d. *Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :*

- *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 48.000.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 46.422.300 atau sebesar 96,71% dengan realisasi fisik 100%.*
- *Penyediaan Bahan Logistik Kantor alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 323.200.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 322.740.000 atau sebesar 99,86% dengan realisasi fisik 100%.*
- *Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 15.697.900 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.476.800 atau sebesar 98,59% dengan realisasi fisik 100%.*
- *Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 9.500.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.480.000 atau sebesar 99,79% dengan realisasi fisik 100%.*
- *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 410.597.000 dengan realisasi keuangan*

sebesar Rp. 332.532.142 atau sebesar 80,99% dengan realisasi fisik 100%.

e. *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :*

- *Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 342.680.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 342.680.000 atau sebesar 100% dengan realisasi fisik 100%.*
- *Pengadaan Mebel alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 27.000.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 27.000.000 atau sebesar 100% dengan realisasi fisik 100%.*
- *Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 157.450.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 155.028.000 atau sebesar 98,46% dengan realisasi fisik 100%.*

f. *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :*

- *Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 34.880.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 18.259.615 atau sebesar 52,35% dengan realisasi fisik 100%.*
- *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 155.700.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 148.380.000 atau sebesar 95,3% dengan realisasi fisik 100%.*

g. *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :*

- *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 226.734.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 179.406.260 atau sebesar 79,13% dengan realisasi fisik 100%.*
- *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 307.920.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 258.860.009 atau sebesar 84,07% dengan realisasi fisik 100%.*

## **2. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum**

Total alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 18.166.663.765

Realisasi keuangan sampai dengan akhir tahun 2023 mencapai Rp. 17.595.805.155 atau sebesar 96,85%. Realisasi fisik program ini mencapai 100% dengan kegiatan :

*a. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan sub kegiatan :*

- *Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 15.323.284.630 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.003.776.882 atau sebesar 97,91% dengan realisasi fisik 100%.*
- *Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 99.996.400 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 97.996.400 atau sebesar 98% dengan realisasi fisik 100%.*
- *Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 78.815.000 atau sebesar 78,81% dengan realisasi fisik 100%.*
- *Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 774.999.800 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 759.132.005 atau sebesar 97,95% dengan realisasi fisik 100%.*
- *Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 1.026.183.585 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 909.854.971 atau sebesar 88,66% dengan realisasi fisik 100%.*
- *Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 99.999.750 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 97.025.626 atau sebesar 97,03% dengan realisasi fisik 100%.*
- *Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 223.539.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 215.821.000 atau sebesar 96,55% dengan realisasi fisik 100%.*

- *Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 15.609.800 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.445.000 atau sebesar 98,94% dengan realisasi fisik 100%.*
  - *Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 60.000.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 50.295.700 atau sebesar 83,83% dengan realisasi fisik 100%.*
- b. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur dengan sub kegiatan :*
- *Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 88.348.100 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 79.935.600 atau sebesar 90,48% dengan realisasi fisik 100%.*
  - *Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 98.666.900 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 87.991.519 atau sebesar 89,18% dengan realisasi fisik 100%.*
  - *Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 126.035.800 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 120.357.446 atau sebesar 95,49% dengan realisasi fisik 100%.*
- c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi dengan sub kegiatan :*
- *Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.303.700 atau sebesar 16,61% dengan realisasi fisik 60%.*
  - *Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 80.000.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 71.054.306 atau sebesar 88,82% dengan realisasi fisik 80%.*

### **3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran**

Total alokasi anggaran untuk Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran sebesar Rp. 4.694.032.300

Realisasi keuangan sampai dengan akhir tahun 2023 mencapai Rp. 4.457.775.745 atau sebesar 94,97%. Realisasi fisik program ini mencapai 100% dengan kegiatan :

*a. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran dengan sub kegiatan :*

- *Penyediaan dan Pemuktahiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 190.758.350 atau sebesar 95,38% dengan realisasi fisik 100%.*
- *Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 2.503.121.300 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.290.076.223 atau sebesar 91.49% dengan realisasi fisik 100%.*
- *Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 1.990.911.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.976.941.172 atau sebesar 99.3% dengan realisasi fisik 100%.*

### 3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan 2023

NO	2022		2023	
	Program	Kegiatan	Program	Kegiatan
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sub kegiatan : - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sub kegiatan : - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sub kegiatan: - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sub kegiatan: - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sub kegiatan : - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sub kegiatan : - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
		Administrasi Umum Perangkat Daerah sub kegiatan : - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Administrasi Umum Perangkat Daerah sub kegiatan : - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub kegiatan : - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pengadaan Mebel - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub kegiatan : - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pengadaan Mebel - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub kegiatan : - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub kegiatan : - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub kegiatan ; - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub kegiatan ; - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

		<p>Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</li> </ul>		<p>Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</li> </ul>
2	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<p>Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Sub kegiatan :</p>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<p>Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Sub kegiatan :</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</li> </ul>



		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur sub kegiatan :		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur sub kegiatan :
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur</li><li>- Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur</li><li>- Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur</li><li>- Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur</li><li>- Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur</li></ul>
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS</li><li>- Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS</li><li>- Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS</li></ul>
3	<b>PROGRAM PENCEGAHAN , PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran sub kegiatan : <ul style="list-style-type: none"><li>- Penyediaan dan Pemuktahiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran</li><li>- Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota</li></ul>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran sub kegiatan : <ul style="list-style-type: none"><li>- Penyediaan dan Pemuktahiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran</li><li>- Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota</li><li>- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri</li></ul>
	<b>Total</b>		<b>Total</b>	
	<b>3 Program</b>	<b>11 Kegiatan, 32 Sub Kegiatan</b>	<b>3 Program</b>	<b>11 Kegiatan, 34 Sub Kegiatan</b>
	<b>Total Anggaran</b>		<b>Total Anggaran</b>	
	<b>Rp. 31.204.862.543</b>		<b>Rp. 34.012.365.655</b>	

N0	2022		2023	
	Belanja langsung	Jumlah	Belanja Operasi	Jumlah
1	Belanja Pegawai	Rp. 9.106.168.298	Belanja Pegawai	Rp. 8.923.330.390
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 21.748.990.245	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 22.385.781.265
	Belanja Hibah	-	Belanja Hibah	-



	<b>Belanja Modal</b>		<b>Belanja Modal</b>	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 349.704.000	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 2.703.254.000
	<b>Total</b>	<b>Rp. 31.204.862.543</b>	<b>Total</b>	<b>Rp. 34.012.365.655</b>

Total Alokasi anggaran 2023 sebesar **Rp. 34.012.365.655** dengan peruntukkan Belanja Pegawai **Rp. 8.923.330.390** mengalami penurunan sebesar **Rp. 182.837.908** atau sebesar 2,01%, ,Belanja Barang dan Jasa **Rp. 22.385.781.265** mengalami kenaikan sebesar **Rp. 636.791.020** atau sebesar 2,93%, Belanja Modal Peralatan dan Mesin **Rp. 2.703.254.000** mengalami kenaikan sebesar **Rp. 2.353.550.000** atau sebesar 673,01%.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Pencapaian sasaran yang dijabarkan dalam 12 (tiga belas) sasaran strategis dan 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja utama dengan capaian kinerja yaitu 100% dengan kategori sangat memuaskan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Eselon II, dengan 1 (satu) Sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja utama dengan capaian kinerja 100% kategori Sangat memuaskan.
2. Eselon III, dengan 2 (dua) Sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja utama dengan capaian kinerja 100% kategori Sangat memuaskan.
3. Eselon IV, dengan 8 (delapan) Sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja utama dengan capaian kinerja 100% kategori memuaskan.

Upaya yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan dalam membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja antara lain dengan menyusun serta mengefektifkan pohon kinerja sebagai landasan dalam penyusunan dokumen kinerja untuk mencapai sinkronisasi antar jenjang/level pada dokumen kinerja, sehingga seluruh entitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan mampu memahami serta menetapkan indikator kinerjanya secara berjenjang.

#### **A. Strategi Peningkatan Kinerja**

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 ini adalah Laporan Evaluasi Kinerja yang telah dilaksanakan selama Tahun 2023. Laporan ini mencakup Laporan Evaluasi Kinerja Program, Laporan Evaluasi Kinerja Kegiatan, Laporan Evaluasi Kinerja Kebijakan dan Evaluasi Keuangan. Dengan laporan ini diharapkan dapat memperjelas atau memberikan gambaran sampai sejauh mana program yang tertuang dalam Renstra telah dilaksanakan. Adapun Strategi yang perlu ditempuh untuk meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan adalah :

1. Memperbaiki sistem pengumpulan data dan pelaporan secara berkala, selanjutnya melakukan pemantauan dan pengukuran kinerja secara individu terhadap pertanggungjawaban kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan serta meningkatkan kualitas revidi atas laporan kinerja.
2. Melaksanakan pelatihan dan asistensi bagi SDM aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan tentang sistem

akuntabilitas kinerja demi terwujudnya pemerintahan yang berkinerja tinggi, transparan, dan akuntabel dengan memanfaatkan dokumen kinerja.

3. Menggambarkan dokumentasi Pelayanan Publik program kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan menggunakan website yang kami Kelola (**[www.satpolppdamkar.provkalsel.go.id](http://www.satpolppdamkar.provkalsel.go.id)**)

Diharapkan dengan adanya laporan kinerja ini akan dapat memacu peningkatan kinerja dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan.

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,**



**Dis. H. ZAKLY ASSWAN, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP 19650909 198602 1 005

## Lampiran Foto Kegiatan Tahun 2023

### SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

## BIDANG PPHD















## BIDANG LINMAS DAMKAR













## BIDANG TIBUM



Jumat, 25 Agustus 2023 08:33:54  
No.4 Jalan Jendral Sudirman  
Antasan Besar  
Kecamatan Banjarmasin Tengah  
Kota Banjarmasin  
Kalimantan Selatan









## BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS













PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Jl. Dharma Praja No.1 Komp. Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan  
Telp. (0511) 4770001 Fax : (0511) 4770019 Email : [satpolpp.provkalsel.pphd@gmail.com](mailto:satpolpp.provkalsel.pphd@gmail.com)



REKAPITULASI DATA PENEGAK/PPNS DILINGKUNGAN SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN SEKALIMANTAN SELATAN TRIWULAN I,II,III,&IV TAHUN 2023

NO	KABUPATEN/KOTA	LUAS WILAYAH			KONDISI/JLH				PELAKSANAAN KASUS												Non Yustisi (Pembinaan)	PROSES YUSTISI					KET
									PROSES PENYELESAIAN KASUS													LIDIK	SIDIK	P- 21	SP- 3	DLM PROSES (BELUM P- 21/SP- 3)	
		BULAN																									
		KM2	KEC	KEL / DESA	PPNS	PERDA	PERKADA	KASUS	J A N	F E B	M A R	A P R	M E I	J U N	J U L	A G S	S E P	O K T	N O V	D E S							
0	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	38.164,28 Km²	153	144/1864	4	247	522	7		1	1	2	1			2				7	x	x	x	x	x	x	
1	KOTA BANJARMASIN	98,46 Km²	5	52/	6	252	522	1471	50	92	56	167	184	76	142	165	50	171	143	175	1328	x	x	143	x	x	x
2	KAB.BARITO KUALA	2,496,46 Km²	17	6/195	1	6	2	56	4	9	7	5	8	2	9	4	1	4	3		56	x	x	x	x	x	x
3	KAB.TABALONG	3,766,97 Km²	12	6/195	2	168	623	165	7	11	27	12	10	27	13	9	15	18	9	7	165	x	x	x	x	x	x
4	KAB.TANAH LAUT	3,631,35 Km²	11	5/130	2	64	1	153	21	27	12	44	13	4	18	11	3				151	x	2	2	x	x	x
5	KAB.KOTABARU	9,382,72 Km²	22	214	3	150	822	73	2	13	9	2	3	2	6	4	4	11	11	6	73	x	x	x	x	x	x
6	KAB.TANAH BUMBU	5,006,96 Km²	10	4/144	5	3		73	20	40	3			1			9				73	x	x	x	x	x	x
7	KAB.HULU SUNGAI SELATAN	1,804,94 Km²	11	8/161	2	122	89	103	9	9	6	11	8	8	13		1	12	12	14	103	x	x	x	x	x	x
8	KAB.HULU SUNGAI TENGAH	1,472,00 Km²	11	169	1	24		1234	110	103	97	91	76	71	80	138	117	113	135	103	1234	x	x	x	x	x	x
9	KAB.HULU SUNGAI UTARA	892,70 Km²	10	5/214	3	10	5	23	2				7		3	3	3	3	2		23	x	x	x	x	x	x
10	KAB.BALANGAN	1,878,30 Km²	8	10/121	4	227	712	68	1	2	2	12	19	4	2	11	10	3	2		64	4	4	4	x	x	x
11	KAB.BANJAR	4,688,06 Km²	20	13/277	2	36		27									15	12		27	x	x	x	x	x	x	
12	KOTA BANJARBARU	371,00 Km²	5	5/144	9			89	5	8	8	8	6	8	8	9	6	10	13		86	x	3	3	x	x	x
13	KAB.TAPIN	2,700,82 Km²	12	4/198	0	176	364	172	0	24	15	15	13	16	16	12	0	15	19	27	172	x	x	x	x	x	x
JUMLAH		38,164,28 Km²	153	281/3983	44	1485	3662	3714	231	339	243	369	348	219	310	366	221	375	361	332	3562	4	9	152	0	0	

Banjarmaru, Desember 2023

KEPALA BIDANG  
PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH

MUHAMMAD DIAN ANSARY, SH. MH

19860619 200903 1 002

KASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

HENDRA KUSUMAWARDHANA, S.Kom

19880811 201001 1 002

LAMPIRAN CSF

CSF  
RENDAHNYA KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH

FAKTOR PENYEBAB	KONDISI YANG DIPERLUKAN
Masih Terjadi Pelanggaran terhadap PERDA & PERKADA	Berkurangnya Pelanggaran terhadap PERDA & PERKADA
Kurangnya pengawasan terhadap penyelenggaraan TRANTIBUMLINMAS	Meningkatnya pengawasan terhadap penyelenggaraan TRANTIBUMLINMAS
Masih rendahnya kualitas SDM SATPOL PP & DAMKAR Prov.Kalsel	Meningkatnya kualitas SDM SATPOL PP & DAMKAR Prov.Kalsel
Masih kurangnya pemberdayaan SATLINMAS & DAMKAR selaku garda terdepan pelayanan Perlindungan Terhadap Masyarakat	Meningkatnya pemberdayaan SATLINMAS & DAMKAR selaku garda terdepan pelayanan Perlindungan Terhadap Masyarakat

CSF PADA OUTCOME  
MENINGKATNYA KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH



**KONDISI YANG DIPERLUKAN AGAR CSF MENINGKATNYA KEPATUHAN MASYARAKAT  
TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH DAPAT TERWUJUD**

CSF	KONDISI YANG DIPERLUKAN
Berkurangnya Pelanggaran terhadap PERDA & PERKADA	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan Penindakan terhadap pelanggaran PERDA &amp; PERKADA</li> <li>b. Melakukan Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat terhadap Pelaksanaan PERDA &amp; PERKADA</li> <li>c. Melakukan Pengawasan terhadap penyelenggaraan PERDA &amp; PERKADA di Kabupaten/Kota</li> </ul>
Meningkatnya pengawasan terhadap penyelenggaraan TRANTIBUMLINMAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan Patroli Wilayah rawan Gangguan pelanggaran TRANTIBUMLINMAS</li> <li>b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait penyelenggaraan TRANTIBUMLINMAS</li> <li>c. Melakukan kerjasama dalam Pengawasan Wilayah maupun penyelenggaraan cipta kondisi TRANTIBUMLINMAS dengan Instansi maupun stakeholder terkait</li> </ul>
Meningkatnya kualitas SDM SATPOL PP & DAMKAR Prov.Kalsel	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan /memfasilitasi pelatihan kepada personil SATPOL PP &amp; DAMKAR dalam rangka Peningkatan Kapasitas</li> <li>b. Melakukan pembinaan terhadap fisik kesamaptaan serta pembinaan Mental dan kerohanian kepada personil</li> <li>c. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas personil PPNS dalam penegakan PERDA &amp; PERKADA</li> </ul>
Meningkatnya pemberdayaan SATLINMAS & DAMKAR selaku garda terdepan pelayanan Perlindungan Terhadap Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan SATPOL PP &amp; DAMKAR Kabupaten/Kota dalam pemberdayaan Anggota SATLINMAS</li> <li>b. Melakukan fasilitasi pembinaan Aparatur SATLINMAS Kabupaten/Kota</li> <li>c. Melakukan fasilitasi pembinaan aparaturnya DAMKAR Kabupaten/Kota</li> <li>d. Penyediaan Peta rawan bencana kebakaran</li> </ul>

